

PROPOSAL TESIS

**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA ONLINE PADA HUMAS
DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NURUL BAYYINAH MUHRIM
E022191024**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA ONLINE PADA HUMAS DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL BAYYINAH MUHRIM

E022191024

Telah diperiksa dan siap untuk dipertahankan dihadapan tim penguji

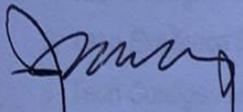
Pada tanggal , **27 Oktober** 2020

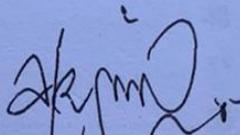
Menyetujui

Komisi Penasehat

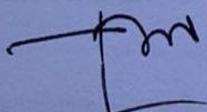
Ketua

Anggota


Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si


Dr. Arianto, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin


Dr. Muhammad Farid, M.Si
NIP. 196107161987021001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Konsep.....	16
1.....	Public
Relations dan Humas Pemerintah	16
2.....	Media
Online di Era Digital Informasi.....	32
B. Kajian Teori.....	46
1.....	Teori
<i>Dialogic</i>	46
2.....	Teori
<i>Exellence Public Relations</i>	51
3.....	Teori
<i>Contigency Of Accomodation</i>	56
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	59
D. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	71
B. Lokasi Penelitian	73
C. Sumber Data.....	73

D. Teknik Pengambilan Data dan Jumlah Informan	74
E. Teknik Analisis Data Kualitatif	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media Online merupakan sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website, radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Iswara (2001) menjelaskan Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya.

Kontennya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, dan lain-lain atau yang tidak berhubungan sama sekali dengannya, misalnya games, chat, kuis, dll. (Abdullah, 2004: 119).

Menurut Abdullah (2004: 86) media Online berupa portal informasi ini, memiliki karakteristik umum yaitu:

- a. Kecepatan (aktualitas) informasi

Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung di upload ke dalam situs web media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan .dan umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan cerita.

b. Adanya pembaruan (Updating) informasi

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya pembaruan (updating) informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini menyebabkan tidak adanya waktu yang diistemewakan (prime time) karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya.

c. Interaktivitas

Salah satu keunggulan media online ini yang paling membedakan dirinya dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari kecenderungan sepihak dari atas (top-down). Sedangkan media online bersifat dua arah dan egaliter. Berbagai fitur yang ada seperti chatroom, e-mail, online polling/survey, games, merupakan contoh interactive options yang terdapat di media online. Pembaca pun dapat menyampaikan

keluhan, saran, atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas.

d. Personalisasi

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi mana yang ia butuhkan. Media Online memberikan peluang kepada setiap pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan menghapus informasi yang tidak di butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan sensor berada di tangan pengguna (self control).

e. Kapasitas muatan dapat diperbesar

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi yang pernah disediakan akan tetap tersimpan dan dapat ditambah kapan saja serta pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (search engine).

f. Terhubung dengan sumber lain (Hyperlink)

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Karakter hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs media online dan menggunakan fasilitas

yang sama dalam media tersebut, misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau games.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi awal perubahan sistem komunikasi Humas pemerintah yang awalnya bersifat satu arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kemudian berubah menjadi dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus publiknya.

Humas dalam sebuah organisasi adalah sebagai penyampai informasi dari organisasi tersebut kepada masyarakat. Semua informasi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi harus dapat dikemas dan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Dewasa ini, Humas menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam setiap organisasi.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa pekerjaan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi ada empat belas poin. Empat belas poin itu yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan dan melakukan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- g. Mengoordinasikan dan merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. Mengoordinasikan dan menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- i. Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan DPRD;
- j. Mengoordinasikan dan merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran tugas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan Humas dan Protokol pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkuat pada dua hal yaitu Memberikan Informasi dan Melakukan Publikasi kegiatan DPRD.

Keandalan Humas dalam melaksanakan tugasnya terkadang menjadi sebuah akses untuk membangun citra organisasi tersebut. Selain untuk membangun citra positif Humas juga berkewajiban mempertahankan citra positif organisasi tersebut. Fungsi Humas dalam membangun citra positif tentunya sangat dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena Humas dapat menyambungkan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakatnya dalam upaya pembangunan citra pemerintah yang positif di mata masyarakatnya.

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada "*Good Governance*". Konsep good governance

mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an diawali dengan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 untuk memperjuangkan adanya good governance and clean government. Tuntutan tersebut diajukan sebagai reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan adanya permasalahan terkait pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi maupun tidak berfungsinya lembaga negara dengan baik serta sulitnya alur partisipasi masyarakat dalam mengawasi kontrol pemerintahan. Setiap badan pemerintahan atau badan publik dari berbagai tingkatan, tidak terkecuali pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan publik yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan membangun masyarakat yang sejahtera.

Untuk menunjang langkah menciptakan good governance, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance yaitu: partisipasi (participation), penegakan hukum (rule of law), transparansi (transparency), responsif (responsiveness), konsensus (consensus orientation), kesetaraan dan keadilan (equity), efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi (strategic vision). Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi era teknologi informasi yang mudah diakses, accountable dan transparan sesuai amanat Instruksi Presiden

Nomor 3 Tahun 2003. Kantor-kantor pemerintah, seperti departemen, atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik.

Pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, keterbukaan dan akuntabilitas organisasi pemerintahan merupakan salah satu tantangan yang dialami oleh humas. Dalam jurnal yang ditulis oleh Juariyah (2016) bahwa masuknya era digital informasi dalam kehidupan manusia membawa perubahan yang signifikan. Dalam sebuah data yang penulis kutip dari Kumparan.com bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175.4 juta jiwa dari total penduduk sebesar 2721.1 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet dalam kehidupannya. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah penyebaran informasi yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan karena informasi yang ada di internet tidak dapat di saring maupun di uji kebenarannya. Hal ini memerlukan kesadaran dari pengguna internet itu sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyediakan data yang benar yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Millet (Dalam Sari, 2012) menyatakan bahwa Humas pemerintah memiliki beberapa tugas utama antara lain mempelajari keinginan publik, menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan

pemerintah serta mencoba menciptakan citra baik pemerintah di mata publik. Untuk mewujudkan tugas ini maka sudah sewajarnya humas memanfaatkan segala jenis saluran tersedia tidak terkecuali pada portal media online.

Humas pemerintah pada umumnya bertugas sebagai komunikator dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Humas pemerintah harus menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang diinformasikan tersebut diantaranya kebijakan baru, prestasi ataupun pencapaian pemerintah itu sendiri, Hal ini diharapkan dapat membangun citra positif instansi terkait dan diharapkan dapat membentuk opini positif publik terhadap kinerja pemerintahan.

Perkembangan digital informasi menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam implementasi tugas Humas. Humas sebagai ujung tombak informasi pemerintah diharuskan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Pengembangan media massa ke media online sebagai sarana untuk penyebaran informasi ke publik juga dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi. Sudah menjadi perhatian umum bahwa portal media online menjadi salah satu kunci untuk dapat menjangkau masyarakat selain menggunakan cara "lama" seperti

pemberitaan koran, televisi, radio dan spanduk/baliho. Berikut contoh pemberitaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di koran Tribun Timur.



Sumber: Gramedia Digital (Diakses pada 12 Oktober 2020)

Berdasarkan olah data sekunder dan observasi awal tercatat sembilan portal media online yang berposko di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu SulselEkspress.com, IniPasti.com, SulselSatu.com, Djournalist.com, Rakyatku.com, Trotoar.id, IniKata.com, MitraPol, dan BeritaSulsel. Berikut media online tersebut serta jumlah berita yang mereka keluarkan sepanjang bulan Juli - September 2020.

No.	Media	Jumlah Berita Juli– September 2020
1.	SulselEkspress.com	10
2.	IniPasti.com	17
3.	SulselSatu.com	18
4.	Djournalist.com	7
5.	Rakyatku.com	8
6.	Trotoar.id	24
7.	IniKata.com	8
8.	MitraPol	8
9.	BeritaSulsel	3

Sumber: Olah data oleh Penulis (Juli-September 2020)

Berdasarkan data di atas, penulis melihat bahwa jumlah publikasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di media online masih kurang serta terjadi ketidakseimbangan dalam jumlah publikasi. Ada lima portal media online yang memuat kurang dari sepuluh berita selama tiga bulan terakhir padahal media tersebut sudah terdaftar berposting di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil pantauan penulis, keempat portal media tersebut masih aktif namun karena sumber daya wartawan yang kurang sehingga portal media tersebut hanya mengandalkan rilis berita kiriman. Humas DPRD Sulawesi Selatan kurang memaksimalkan pemberitaan

beberapa media online. Hal ini tentu menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berita yang sering muncul menjadi headline adalah pada saat ada aksi, demo, maupun sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berita mengenai kegiatan kedewanan seperti reses, koordinasi dan kunjungan kerja belum begitu menjadi perhatian. Penulis melihat diperlukan keaktifan humas agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dalam menyediakan bahan informasi dan publikasi tentang kegiatan kedewanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan kedewanan seperti reses, koordinasi, komunikasi dalam dan luar daerah serta kunjungan kerja dapat menjadi bahan liputan untuk menunjukkan kinerja kedewanan.

Melihat penjabaran di atas maka dapat ditarik bahwa Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu memahami dengan baik tugasnya sebelum melakukan implementasi program kerja sesuai dengan yang tertuang dalam Tugas Pokok Humas DPRD. Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat bahwa masih diperlukan beberapa pembenahan dalam pengelolaan pemanfaatan media online dalam menjalin hubungan dengan publik. Sehingga penulis berkeinginan untuk menjadikah hal tersebut sebagai penelitian penulis.

Untuk itu penulis ingin mencoba meneliti tentang **Analisis Penggunaan Media Online Pada Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan Media Online?
2. Bagaimana Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalin hubungan dengan publik d Era Digital Informasi?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan media online untuk menjalin hubungan dengan publik di Era Digital Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat:

1. Mengetahui dan menganalisis Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan Media Online?
2. Mengetahui dan menganalisis Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalin hubungan dengan publik d Era Digital Informasi?
3. Mengetahui dan Menganalisis faktor penghambat dan pendukung Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menggunakan media online untuk menjalin hubugan dengan publik di Era Digital Informasi?

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait perkembangan ilmu komunikasi, khususnya ilmu komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan program kerja pada Subbagian Hubungan

Masyarakat, Protokol, dan Publikasi pada Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Public Relations dan Humas Pemerintahan

Public Relations dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Hubungan Masyarakat atau Humas. Biasanya Humas sering digunakan dalam instansi pemerintah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pengertian Humas dan Public Relations, keduanya sama dari segi pengertian, proses, tujuan, fungsi dan kegiatannya. Semua orang percaya bahwa definisi dari Public Relations/ Humas bisa saja berbeda – beda arti bagi masing – masing pihak. Ada yang melihatnya dari segi komunikasi, publikasi, manajemen, pemasaran atau periklanan, begitu kompleksnya.

Penjelasan menurut Grunig (1989) dalam Kriyantono (2014) menyatakan bahwa Public Relations adalah penggunaan komunikasi untuk memanipulasi publik demi kepentingan organisasi. Barney (1955) dalam Morissan (2009) mendeskripsikan PR sebagai "*Inducing the public to have understanding for and goodwill* (Membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta niat baik).

Demikian pula, Cutlip-Centre-Broom (2006) mendefinisikan PR sebagai berikut:

the planned effort to influence opinion through good character and responsible performance, based on mutually satisfactory two-way communication (Usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan). Public Relations adalah penggunaan komunikasi yang terencana untuk membujuk publik agar mendukung organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang memuaskan.

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan publiknya, menyangkut aktifitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam menghadapi masalah, dan bertindak sebagai peringatan dini dalam mengantisipasi penggunaan teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama kegiatan kehumasan (Rex Harlow Dalam Iksan dan Mandalia, 2015).

Kegiatan Public Relations pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik komunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah (*two way communication*) antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya. Setelah melakukan kegiatan komunikasi tersebut, pihak Humas menganalisa untuk mengetahui efeknya atau feed back, apakah berdampak baik terhadap citra, atau sebaliknya menjadidi negatif sehingga kurang menguntungkan posisi organisasi atau lembaga bersangkutan di mata masyarakat (Ruslan, 1999:19).

Definisi Public Relations yang dikemukakan oleh para ahli atau pakar, menurut *International Public Relations Associations* (IPRA) terbitan gold paper N0 4 dengan judul *A model for public relations education for profesional practice*, walaupun terdapat perbedaan, tetapi mengandung kesamaan arti diantaranya :

- a. Public Relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian dan citra baik di masyarakat.
- b. Sasaran Public Relations adalah berupaya ciptakan opini publik yang favorable dan menguntungkan semua pihak.
- c. Public Relations merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung manajemen untuk menciptakan tujuan yang spesifik dari organisasi atau lembaga.
- d. Public Relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dengan pihak masyarakat melalui suatu proses timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif (Ruslan, 2005 :8).

Sudah selayaknya seorang praktisi Public Relations memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan organisasinya. Menurut Smith (2005) praktisi Public Relations sewajarnya mampu menganalisis tiga hal yaitu:

- 1) Menganalisis situasi yaitu menganalisa perencanaan, siapa klien kita, siapa supervisor, siapa orang-orang penting dalam perusahaan dan siapa pengambil kebijakan tertinggi. Artinya humas harus mengetahui kepada siapa dia akan bertanya jika terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan dan siapa yang kredibel untuk menjelaskan kepada publiknya;
- 2) Menganalisis organisasi yaitu memahami tiga aspek organisasi antara lain (1). Lingkungan internal (visi dan misi, kinerja dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi); (2). Memahami persepsi publik terhadap organisasi; dan (3). Lingkungan eksternal antara lain saingan, lawan serta pendukung;
- 3) Menganalisis siapa publik kita. Perlu dipahami bahwa organisasi kita berinteraksi dengan berbagai jenis publik. Sehingga, kita harus menganalisa *key public* yang penting untuk kita 'pegang' dalam menghadapi isu tertentu.

Dengan memiliki kemampuan dalam menganalisa situasi, organisasi dan publik maka harapannya adalah petugas humas dapat memberikan solusi yang jitu dalam menghadapi situasi tertentu. Untuk dapat melakukan analisa yang baik humas harus dapat menganalisa isu yang beredar di publik. Menurut Soerjono Soekamto yang dikutip dalam (Djoenarsih, Sunarjo, 1984 :19) mengatakan bahwa publik berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan, berinteraksi secara tidak langsung melalui media komunikasi, baik komunikasi secara umum

misalnya pembicaraan secara pribadi, desas-desus, melalui media komunikasi seperti pers, radio, televisi, film dan sebagainya. Publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal (Frank Jefkins yang dikutip oleh (Fajar, 2009 : 56-57). Sedangkan Zawawi (2000) memiliki pengertian sederhana mengenai publik yakni sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama.

Dikutip dari (Soemirat, Ardianto , 2002 : 15), publik dalam Public Relations dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Publik Internal dan publik eksternal

Internal Publik yaitu publik yang berada di dalam organisasi/perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Eksternal publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen, pelanggan, komunitas dan pemasok.

2. Publik primer, sekunder, dan marginal

Publik primer bisa sangat membantu atau merintangi upaya suatu perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Contoh, anggota Federal Reserve Board of Governor (dewan gubernur cadangan federal) yang ikut mengatur masalah

perbankan, menjadi publik primer untuk sebuah bank yang menunggu rotasi secara teratur, dimana anggota legislatif dan masyarakat menjadi publik sekundernya

3. Publik tradisional dan publik masa depan

Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa/pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen dan pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa depan.

4. *Proponents, opponent, dan uncommitted*

Diantara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan (*opponents*), yang memihak (*proponents*) dan ada yang tidak peduli (*uncommitted*). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan (Seitel, 1992:13-14).

5. Silent majority dan vocal minority

Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan *complaint* (keluhan) atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal (aktif) dan yang *silent* (pasif). Publik penulis di surat kabar umumnya adalah *the vocal minority*, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya (Kasali, 1994:11).

Penjelasan Wilcox dan Cameroon (2009) menjabarkan beberapa fungsi dari Public Relations yaitu:

- 1) *Counseling*. Humas diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan dan hubungan komunikasi.
- 2) *Research*. Humas diharapkan dapat memastikan sikap dan perilaku masyarakat. Riset dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kesepahaman atau mempengaruhi publik.
- 3) *Media Relations*. Humas diharapkan dapat membangun hubungan dengan media massa dalam mencari publisitas dan memunculkan perhatian terhadap organisasi.
- 4) *Member Relations*. Humas diharapkan dapat merespon terhadap sebuah isu serta menginformasikan dan memotivasi karyawan perusahaan.
- 5) *Community Relations*. Humas diharapkan dapat merancang sebuah aktifitas yang melibatkan komunitas guna menjaga hubungan yang baik antara organisasi dengan komunitas sekitar.
- 6) *Public Affairs*. Humas diharapkan dapat mengembangkan keterlibatan terhadap kebijakan public agar organisasi dapat beradaptasi dengan ekspektasi public.
- 7) *Government Affairs*. Humas diharapkan dapat berhubungan langsung dengan legislative atau pembuat kebijakan.

- 8) *Issues Management*. Humas diharapkan dapat mengidentifikasi isu dan menjaga agar isu tersebut tidak mempengaruhi organisasi.
- 9) *Financial Management*. Humas diharapkan dapat membangun dan menjaga kepercayaan investor.
- 10) *Industry Relations*. Humas diharapkan dapat menjaga hubungan dengan organisasi lain atau hubungan dagang lainnya.
- 11) *Fund Raising*. Humas diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara finansial terhadap organisasi.
- 12) *Multicultural Relationship*. Humas diharapkan dapat menghubungkan individu atau grup dalam berbagai grup budaya berbeda.
- 13) *Special Event*. Mendorong ketertarikan terhadap individu, kelompok atau organisasi dengan metode even yang direncanakan. Kegiatan juga direncanakan agar mereka dapat berinteraksi dengan publik.
- 14) *Marketing Communication*. Kombinasi dari berbagai aktivitas dengan tujuan menjual produk, jasa atau ide termasuk iklan, publisitas, promosi dan even khusus.

Public Relations diharapkan dapat memperaktekan fungsi-fungsi tersebut dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. Tench dan Yeomans (2006) menyatakan bahwa publik memiliki tanggung jawab terhadap isu

publik eksternal dan internal. Untuk menganalisa isu publik eksternal dapat dibagi dua yaitu isu makro dan isu task. Isu makro dapat dianalisa menggunakan analisa PEST. Sedangkan isu task biasanya lebih terkontrol contohnya adalah konsumen dan *Shareholders*.

<p>Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situasi politik antar Negara - Perubahan rezim - Kebijakan ekonomi 	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga - Nilai mata uang - Nilai Devisa Negara
<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola hidup - Perubahan demografi - Pola belanja masyarakat 	<p>Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi baru - Biaya riset dan pengembangan - Dampak teknologi

Diadaptasi dari Analisa PEST, Buku *Exploring PR*

Selain isu eksternal, isu yang dihadapi oleh humas adalah isu internal. Isu internal ini berkuat dengan bentuk organisasi dan bidang dimana dia beroperasi. Maksud dari bentuk adalah jika dia organisasi yang kecil yang hanya beroperasi pada satu wilayah maka tantangan komunikasi yang dihadapi relatif dapat diprediksi sedangkan bidang organisasi adalah sektor dimana dia berdiri.

Penanganan kehumasan untuk perusahaan makanan berbeda dengan penanganan kehumasan organisasi yang bergerak di bidang jasa

ataupun keuangan. Beberapa isu internal yang dapat dilihat pada buku ini antara lain sektor organisasi itu bergerak, ukuran dari perusahaan tersebut, perkembangan dan budaya organisasi.

Grunig dan Hunt (Dalam Waddington, 2013) menunjukkan empat model kehumasan yaitu:

1. *Press Agency*

Pada abad ke-19, agen pers bekerja untuk mempengaruhi opini publik dengan menciptakan berita. Agen pers berinvestasi waktu dalam penelitian namun kurang dalam pembahasan etika. Tujuannya adalah manipulasi. Menekan pada praktek PR yang fokus pada upaya promosi, publisitas, dan propaganda publik (Lattimore dkk.2010:63). Praktisi PR dalam model ini dihalalkan untuk melakukan segala cara demi mendongkrak nama organisasi atau orang yang diwakilinya.

2. *Public Information*

Model PR ini mulai muncul awal abad ke-20. yang bergeser ke arah yang lebih benar dan tepat dalam berkomunikasi. Tetapi tidak lebih dari mendistribusikan informasi. Berbeda dengan model pertama, model ini tidak digunakan untuk memperlak publik dan menekan pada pemberian informasi yang jujur (Butterick,2012:32). Komunikasi ini lebih mengarah kepada komunikasi satu arah.

3. *Two Way Communication Asymmetrical*

Model komunikasi ini adalah model komunikasi dua arah. Tujuannya ialah keseimbangannya. Model ini tentang persuasi yang dapat

memicu transaksi hingga popularitas dalam pemasaran. Dengan model ini tetap berusaha untuk memposisikan publik sebagai pihak yang harus berubah sesuai dengan keinginan organisasi dan bukan sebaliknya (Lattimore,dkk. 2010:64).

4. *Two Way Communication Symetrical*

Model komunikasi ini menekan pada adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri. Model inilah yang kemudian diklaim oleh Grunig dan Hunt sebagai model yang paling baik yang dapat menentukan kesuksesan praktek PR dalam Organisasi. (Butterick, 2012:34)

Model	Tipe Komunikasi	Karakteristik
<i>Press Agency</i>	Komunikasi satu arah	Menggunakan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak agar bertingkah sesuai keinginan organisasi.
<i>Public Information</i>	Komunikasi satu arah	Melakukan teknik komunikasi satu arah untuk mendistribusikan informasi.

<p><i>Two-Way</i> <i>Asymmetrical</i></p>	<p>Komunikasi dua arah</p>	<p>Menggunakan persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi khalayak agar bertindak sesuai keinginan organisasi.</p>
<p><i>Two-Way</i> <i>Symmetrical</i></p>	<p>Komunikasi dua arah</p>	<p>Menggunakan komunikasi untuk bernegosiasi, menyelesaikan konflik dan menumbuhkan kesepahaman antar organisasi.</p>

Sumber: Model PR Grunig dan Hunt dalam Weddington, 2013

Pemahaman Public Relation secara umum. Humas dalam tata pemerintahan. Public Relations atau Humas adalah penggunaan komunikasi yang terencana untuk membujuk publik agar mendukung organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang memuaskan. Definisi ini juga berlaku bagi Humas pemerintah namun dalam prakteknya yang membedakan fungsi Humas swasta dan pemerintah adalah unsur komersial (Ruslan dalam Sari, 2012).

Humas pemerintah merupakan penyambung antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Crespo dan Echart (2011) performa pemerintah dapat diberikan oleh publik melalui kapasitas pemerintah dalam menghadapi persoalan dan mengelola kebijakan publik. Sehingga Grunig dan Hunt (1999) menyarankan agar pemerintah menjaga kepercayaan, kepuasan, dan komunal yang merupakan pekerjaan seorang humas.

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 6 tahun 2014 pasal satu menyebutkan bahwa pranata Humas adalah pegawai negeri sipil yang melakukan pekerjaan pelayanan informasi kehumasn. Pekerjaan pelayanan informasi dan kehumasan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pranata humas, mulai dari perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pedoman tata kelola Humas pemerintah bahwa kehumasan harus melaksanakan fungsi manajemen informasi dan komunikasi secara persuasif, efektif dan efisien. Dalam rangka menciptakan hubungan harmonis dengan khalayak agar citra pemerintah menjadi positif. Untuk melakukan hal tersebut Humas pemerintah harus dapat menganalisa situasi, membuat strategi, melakukan implementasi dan evaluasi yang berpegang pada etika kehumasan (Permenpan RB No. 30 Tahun 2011).

Pedoman umum Humas pemerintah juga menuliskan pada pasal 21 bahwa Humas pemerintah harus memiliki kualifikasi antara lain kemampuan untuk berbicara persuasif dan menulis efektif. Memiliki pemahaman media berita, keuangan dan manajerial. Humas pemerintah juga harus cakap dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan dan menangani publik. Serta berpikir logis, kreatif dan beretika tinggi (Permenpan RB No.8 Tahun 2007).

Selanjutnya, Humas harus melakukan tugas dan fungsinya dengan bermitra bersama pemangku kepentingan seperti:

- a. Kelompok media meliputi jurnalis, media cetak, elektronik dan online serta pengusaha media dan organisasi profesi media.
- b. Kelompok internal antara lain Pimpinan dan Pegawai pemerintah
- c. Kelompok eksternal yaitu masyarakat
- d. Kelompok lembaga pemerintah seperti kementerian, BUMN/BUMD, TNI/Polri.
- e. Lembaga penyelenggaran negara antara lain legislatif, yudikatif, dsb
- f. Kelompok lembaga swadaya masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga international.

Menurut John D. Millet (Dalam Sari, 2012) Humas pemerintah memiliki tugas utama antara lain;

- a. Mempelajari dan mengamati tentang hasrat, keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration);
- b. Memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan publiknya (advising the public about what should desire);
- c. Mengusahakan agar terjadinya hubungan yang memuaskan antara publik dengan aparat pemerintah (ensuring satisfactory between public and government official);
- d. Memberikan informasi dan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (informing and explaining about what agency is doing).

Effendy (Dalam Aras, 2014) menyatakan bahwa Humas pemerintah harus dapat menyebarluaskan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik masyarakat mengenai perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat tersebut. Senada dengan hal tersebut Ruslan (Dalam Aras, 2014) menyatakan bahwa Humas harus memperlancar jalan interaksi dan penyebaran informasi mengenai pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pers media cetak maupun elektronik.

Juariyah (2016) dalam *Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication* menerbitkan jurnal tentang tantangan humas dalam menghadapi era web 2.0 yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi fungsi Humas yaitu *informed and explaining to public* serta menjaga relasi baik antara publik dan pemerintah. Humas perlu memahami bahwa perkembangan teknologi akan berdampak pada implementasi tugas pokok dan fungsi humas.

Perkembangan teknologi dengan munculnya internet yang disusul dengan berkembangnya media sosial sehingga manusia semakin mudah berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang berkembang menjadi tidak terkendali. Disinilah peran humas diharapkan dapat mengatur arus informasi tersebut melalui saluran-saluran yang dimiliki serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Gejala tantangan web 2.0 terhadap tugas dan fungsi pemerintah telah dihadapi dengan dikeluarkannya aturan-aturan yang mengharuskan humas menjadi lebih cermat dan lebih tepat dalam memilih saluran. Sejak 2003 sebenarnya pemerintah telah memberlakukan status awas terhadap Web 2.0 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerapan e-Government.

Namun, penerapan respon pemerintah tersebut lambat untuk diaplikasikan sampai ke daerah. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah masih belum menganggap Web 2.0 sebagai tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dapat ditunjukkan bahwa tindak lanjut dari Inpres ini muncul setelah lima tahun yakni Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi publik tahun 2008.

Sehingga, menjadi perhatian bahwa tugas dan fungsi humas tidak lagi hanya dokumentasi dan kliping melainkan memberikan informasi dan membangun dan menjadi relasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah melalui pemanfaatan web 2.0. seperti yang tertuang dalam Permenpan RB No. 31 Tahun 2011 tentang infrastruktur humas pemerintah yang menempatkan internet dan website sebagai komponen penting dalam pedoman pelaksanaan tugas humas pemerintah.

2. Media Online di Era Digital

New Media (Media Baru) merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy. Media baru adalah teori yang membahas mengenai perkembangan media. *New Media* atau yang sering disebut juga media online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital (Creeber dan Martin, 2009). Definisi lain media online adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat

konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011).

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang complex dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media karena media ini adalah sesuatu yang terus selalu berkembang dari media zaman dahulu (old media) sampai sekarang yang sudah menggunakan digital (modern media/new media).

Selama tahun 2000, internet telah memasuki fase yang disebut web 2.0. (web two point-oh), dimana semua menjadi lebih interaktif dan telah menjadi area untuk semua orang, tidak hanya milik beberapa pihak saja. Semua orang saat ini dapat langsung mengambil peran dan menaruh apapun kedalam internet.

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (New media). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998:110). Internet merupakan sebuah media dengan segala karakteristiknya. Internet memiliki teknologi, cara penggunaan, lingkup layanan, isi dan image

sendiri. Internet tidak dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah jaringan komputer yang terhubung secara intensional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet (McQuail, 2009: 28-29).

Menurut Septiawan Santana Kurnia dalam bukunya *Jurnalisme Kontemporer* (2005) internet adalah sebuah medium terbaru yang mengkonvergensi seluruh karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu. Apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, namun perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan fasilitas mengakses informasi, densitas (kepekatan atau kepadatan) dan kekayaan arus-arus informasi, jumlah fungsionalitas atau intelijen yang dapat ditransfer. Jadi menurut Santana, titik esensinya adalah bahwa keunikan internet terletak pada esensinya sebagai sebuah medium (Setyani, 2013:5).

Untuk mengakses Internet, seseorang membutuhkan koneksi Internet dan piranti keras seperti komputer, PDA, Blackberry dan lain sebagainya. Internet yang dianggap sebagai gabungan dari beberapa bentuk media dan fasilitas email, website, newsgroup, e-commerce dan sebagainya (Lievrouw, 2006:221).

Peneliti komunikasi Carrie Heeter (1988) memaparkan dimensi-dimensi interaktivitas yang digunakan untuk mengklarifikasi media, yaitu:

1. Dimensi kompleksitas dari pilihan yang tersedia. Maksudnya adalah berapa banyak pilihan yang dimiliki khalayak dalam segi isi informasi dan waktu yang bias digunakan untuk mengaksesnya.
2. Dimensi besaran usaha yang harus dikeluarkan oleh khalayak untuk dapat menerima pesan dari media yang bersangkutan. Dengan kata lain, bagaimana perbandingan aktivitas yang dilakukan khalayak dengan aktivitas yang dibuat media.
3. Dimensi tingkat respon media terhadap khalayaknya. Maksudnya adalah seberapa aktif sebuah media dapat merespon umpan balik yang diberikan khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi menanggapi umpan balik yang diberikan oleh khalayaknya dengan cepat. Dalam kondisi tertentu, media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat melakukan interaksi dengan khalayaknya seakan-akan melakukan percakapan langsung.
4. Dimensi kemampuan untuk mengawasi pengguna informasi oleh khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat memantau perilaku khalayak dalam menerima pesannya, kemudian menyesuaikan sistemnya berdasarkan umpan balik yang dihasilkan dari analisis perilaku tersebut.

5. Dimensi kemudahan dalam menambah informasi baru. Maksudnya adalah seberapa mudah khalayak dapat turut menyediakan dan menyebarkan pesan kepada khalayak lain. Berdasarkan kriteria ini, siaran televisi memiliki interaktivitas rendah, sedangkan media online memiliki tingkat interaktivitas yang sangat tinggi.
6. Dimensi kemampuan memfasilitasi komunikasi internet. Maksudnya adalah seberapa mudah interaksi terjadi antar khalayak dapat terjadi (Heeter, 1988:25).

Jelas *new media* (media baru/media online) memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru dan ter-update informasinya. Kelemahannya pada jaringan koneksi internet saja jika jaringan internet lancar dan cepat maka informasi yang disampaikan kepada pembacanya dengan cepat serta harus ada juga koneksi internet dimana pun berada bersama media baru (*new media*/media online). Media online/media baru (*New Media*) masuk ke dalam kategori komunikasi massa, karena pesan yang disampaikan kepada khalayak luas lewat media online / Media Baru (*New Media*).

Internet merupakan salah satu teknologi komunikasi baru juga memiliki kemampuan untuk membantu kita memilih dan mengatur informasi yang kita inginkan atau perlukan dengan lebih efisien. Secara

garis besar, internet jauh lebih luwes dalam menjembatani waktu dan jarak dibandingkan media-media yang sudah ada terlebih dahulu.

Sebagai media komunikasi, internet mempunyai peranan penting sebagai alat (channel) untuk menyampaikan pesan (message) dari komunikator/penyalur pesan (source) kepada komunikan/penerima pesan (receiver). Sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah transaksional, dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif (terus-menerus) dan ada umpan balik (feedback) dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antar individu dengan mempertimbangkan untung/rugi dalam setiap interaksi.

Internet juga dianggap memiliki kapasitas besar sebagai media baru. Tidak hanya memperkecil jarak dalam mengkomunikasikan pesan, teknologi komputer dan internet juga telah berkembang dan mengeliminasi penggunaan koneksi kabel, namun tetap bias memfasilitasi transmisi informasi yang sangat cepat ke seluruh dunia (Bagdakian, 2004:114). Menurut Bagdakian, duplikasi dan penyebaran matri dari Internet ini bisa mencapai jangkauan yang sangat luas. Satu orang khalayak bisa mengunduh kemudian menyebarkannya pada orang-orang dalam jaringan pertemanan atau jaringan kerjanya. Kemudian pihak yang mendapatkan sebaran itu bisa menyebarkannya lagi pada orang-orang dalam jaringannya, dan seterusnya.

Definisi mengenai online diberikan oleh John M. Echols dan Hasan Shadily (1993). On berarti sedang berlangsung, dan line berarti garis, barisan, jarak dan tema Singkatnya, online berarti proses pengaksesan informasi yang sedang berlangsung melalui media internet. Menurut Harris Poll (1969), lebih dari 137 juta orang Amerika melaksanakan seluruh kegiatan mereka melalui dunia internet. Pada tahun 1995, hanya 9% orang yang belum memanfaatkan internet. Saat ini diperkirakan pengguna internet lebih dari tiga jam perharinya.

Menurut Asep Syamsul M. Romli dalam buku *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa, Bandung, 2012) mengartikan media online sebagai berikut : Media online (online media) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Masih menurut Romli dalam buku tersebut, media online adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (*electronic media*) –radio, televisi, dan film/video. Media Online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online –disebut juga *cyber journalisme*– didefinisikan wikipedia sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet". Secara teknis atau "fisik", media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet).

Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa

dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka *email*, *mailing list* (milis), *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media online.

Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Pengertian media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara online. Jurnalistik online – disebut juga *cyber journalisme* didefinisikan wikipedia sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan di distribusikan melalui internet”.

Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website atau situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email. Media online berupa situs berita bisa diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu:

- a). Situs Berita Berupa "*Edisi Online*" dari Media Cetak Surat Kabar atau Majalah.

Suatu situs pemberitaan yang diambil dari sebuah surat kabar atau majalah dalam pembublikasian disuatu situs porta pemberitaan jadi dsini berita tidak hanya tersedia di media cetak akan tetapi media

juga tersedia di media situs online seperti halnya: republika online, kompas cybermedia, media-indonesia.com.

b). Situs Berita Berupa "Edisi Online" Media Penyiaran Radio.

Situs berita ini berasal dari suatu saluran radio, akan tetapi sekarang sudah bisa dinikmati melalui media online. Karena untuk mempermudah pengguna atau pendengar menikmati siarannya radio maka juga disediakan versi onlinenya seperti serua streamingnya. Contohnya : RRlpro4.com, suarasurabaya.net.

c). Situs Berita Online" Murni Yang Tidak Terkait Dengan Media Cetak Atau Elektronik.

Situs berita ini tidak terkait dengan media cetak maupun media televisi ataupun radio. Situs berita online ini murni produk pemberitaan sendiri sehingga menjadikan media online sebagai produk utama dalam media keredaksian sehingga pemberitaan selalu diperbarui setiap perjam karena salah satu karakter dari pemberitaan online adalah selalu cepat diperbarui. Contohnya: antaranews.com, detik.com dan viva.co.id

d). Situs "Indeks Berita" Yang Hanya Memuat Link-Link Berita Dari Situs Berita Lain.

Situs berita ini tidak memiliki tim keredaksian dalam pembuatan berita jadi situs berita ini hanya mengambil atau melink dari

situs berita milik media online lainnya. Seperti media online milik dari: yahoo! news, google news, cealsea news dan news now.

Pengaruh teknologi telah berdampak besar dalam kehidupan manusia. Saat ini, teknologi ada dimana-mana dan hampir dalam semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan terutama oleh teknologi. Terkadang, teknologi yang dihasilkan manusia membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu teknologi tersebut menjadikan hidup manusia menjadi susah. Teknologi membentuk dan mengubah budaya serta lingkungan manusia. Pengalaman manusia tanpa teknologi sangatlah sedikit dan justru menjadi aneh ketika manusia tanpa menggunakan teknologi (Lim, Francis, 2008: 1).

Teknologi mengalami berbagai macam inovasi dari yang sebelumnya sederhana (mekanik) menjadi lebih canggih (mikroelektrik). Teknologi canggih yang digunakan manusia saat ini adalah teknologi yang dikendalikan oleh komponen microchip. Komponen tersebut telah diprogram oleh manusia sesuai kebutuhan melalui baris logika yang tersistematis dalam struktur algoritma.

Dengan adanya komponen microchip, perangkat elektronika dapat dibentuk secara portable dan mobile. Perangkat yang mengintegrasikan microchip di dalamnya seperti komputer, hanphone, smartphone, tablet PC, laptop dan berbagai perangkat penghitung dan perangkat komunikasi.

Komponen microchip tersebut yang berfungsi untuk mengolah dan memproses sinyal-sinyal digital. Digital merupakan kombinasi urutan bilangan-bilangan biner 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal disebut sebuah “bit” teknologi digital yang memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog (Jack, 2002:142):

- a. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi (instant).
- b. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.
- c. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk.
- d. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.

Perkembangan teknologi membawa babak baru bagi peradaban manusia. Dalam hal ini teknologi digital seperti komputer dan telepon seluler memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar perangkat berteknologi tinggi seperti komputer hadir dalam keseharian masyarakat. Melalui layanan internet masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dan berkomunikasi.

Lembaga publik atau organisasi sebaiknya lebih peka dalam mengikuti perkembangan teknologi. Melalui teknologi berbasis digital, hambatan jarak, ukuran dan ruang dapat diatasi, sehingga memungkinkan peristiwa yang terjadi di berbagai bagian dunia dapat dilihat secara live atau real-time di seluruh dunia secara praktis. Saat ini lingkungan telah dikuasai oleh berbagai macam *interface*, yaitu relasi yang diperantai oleh mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia dengan mesin. *Interface* di dalam lingkungan, dengan aneka peralatan dan *gadget* yang mendukungnya, mengakibatkan terbentuknya gaya hidup digital di dalam masyarakat mutakhir (Yasraf, 2010:240).

Wujud demokrasi tentang keterbukaan informasi di era digital informasi ini juga tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial yang diharapkan salah satu unsurnya adalah keadilan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan harkat dan martabat bangsa. Humas pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Era sekarang ini disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi publik kemudian dikelola oleh pejabat yang ditunjuk untuk menangani informasi publik. Pejabat tersebut dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tanggung jawab untuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang disampaikan ke publik berisikan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan anggaran belanja daerah maupun anggaran belanja Negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program yang dihasilkan oleh pemerintah dengan bantuan pengawasan oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam pengembangan program suatu instansi, dapat mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang dilaksanakan dan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Good Governance*.

Good Governance merupakan sebuah konsep pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan objektif dan adil (Srijanti, 2007). Umumnya sama dengan prinsip transparansi dalam setiap aktivitas pemerintahan. Prinsip transparansi ini diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam interaksi yang dilakukan antara pemerintahan dan masyarakat. Piotrowsy dan Van Rinzin (Dalam Dwiyanto, 2011) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui website secara aktif, perlindungan terhadap whistle blowers dan bahkan melalui pembocoran informasi secara ilegal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lewat media online di era digital informasi sangatlah bermanfaat dalam menginformasikan seluruh kegiatan pemerintahan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan konsep pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan objektif dan adil.

B. Kajian Teori

1. *Dialogic Theory*

Dialog Teori (Dialogic Theory) telah menjadi sasaran pengamatan dan penerimaan terluas daripada teori PR lainnya. Aktivis politik dan sosial, sarjana komunikasi, hubungan masyarakat, pendidikan, feminisme, bahasa dan sastra, filsafat, politik, psikologi, teologi, teknologi, dan bidang lain mempelajari prinsip-prinsip dialogis. Salah satu perbedaan utama antara teori dialogis dan pendekatan teoritis lainnya untuk mempelajari PR, seperti OPR (organisasi hubungan masyarakat) bahwa dialog menempatkan penekanan komunikatif pada kebutuhan pemangku kepentingan dan publik, dan membangun hubungan yang tulus dengan pemangku kepentingan dan publik dibanding melihat pekerjaan profesional PR sebagai pekerja sewaan yang terutama melayani tujuan organisasi.

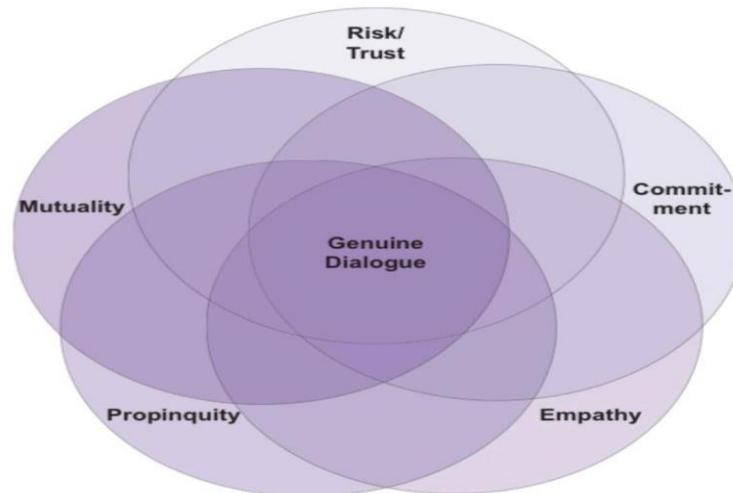
Teori dialog merepresentasikan sekumpulan prinsip komunikasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi interaksi antara dua orang, atau di antara sekelompok kecil individu (Buber, 1970). Dialog dimulai dari asumsi bahwa berbagai fitur komunikasi antarpribadi (misalnya, risiko, kepercayaan, hal positif, empati, dll.) Diperlukan agar orang memiliki interaksi yang bermanfaat, jujur, dan bermakna (cf., Johannesen, 1990; Kent & Taylor, 2002). Namun, dialog lebih dari sekadar percakapan dangkal dan narsistik yang dipertukarkan di platform media sosial (Taylor

& Kent, 2014; Theunissen & Wan Noordin, 2012). Komunikator dialogis berkomitmen untuk terlibat dalam interaksi yang menantang dan bermakna dan perlu menerima pelatihan dalam teori dan teknik dialog untuk menggunakan dialog secara efektif.

Sebagian dialog muncul dari pengalaman propaganda ahli teori dan filsuf sebelum Perang Dunia I Martin Buber (1923), serta dari aktivis, radikal, cendekiawan, pendidik, dan ilmuwan seperti Carl Rogers (1957), Paulo Freire (1970), RD Laing (1961), Nel Noddings (1984), Mikhail Bakhtin (1975), dan banyak lainnya. Dialog telah berteori sebagai bentuk asli dari komunikasi antarpribadi yang mengacu pada prinsip-prinsip humanistik seperti kepercayaan (Freire), "perhatian positif tanpa syarat untuk orang lain" (Rogers), empati dan simpati (Noddings), dan sejumlah variabel relasional lain yang memiliki telah dipelajari oleh sarjana komunikasi (lih., Stewart, 1978), psikolog (misalnya, Gurin, Nagda, & Zúñiga, 2013), ahli etika (Burbules, 1993), pendidik (Phillips & Napan, 2016), dan lain-lain.

Sarjana hubungan masyarakat Kent dan Taylor (2002) mensurvei literatur dan mengumpulkan daftar fitur dialog yang diterima secara umum, yang meliputi: risiko, mutualitas, kedekatan, empati, dan komitmen. Meskipun setiap fitur dialog tidak perlu atau tidak selalu ada dalam setiap interaksi dialogis, semakin banyak fitur dialog yang hadir maka akan semakin kuat ikatan dialogisnya. Seperti pertimbangan berikut ini:

Gambar 1 , dialogic model, Petra Theunissen & Kent



- **Risiko/Risk** melibatkan kerentanan, terbuka terhadap pengalaman dan konsekuensi yang tidak diantisipasi, dan "pengakuan akan keanehan yang aneh" yang melibatkan penerimaan tanpa syarat atas keunikan orang lain.
- **Kebersamaan/Mutuality** melibatkan kolaborasi dengan orang lain, dan semangat kesetaraan. Kebersamaan menunjukkan bahwa interaksi harus dibangun di atas pijakan yang setara.
- **Keakraban/Propinquity** melibatkan kesegeraan kehadiran atau interaksi real-time, kesadaran aliran temporal hubungan atau pengakuan akan masa lalu, masa kini, dan potensi hubungan masa depan yang dimungkinkan dengan orang lain, dan keterikatan dengan keyakinan dan gagasan lain.
- **Empati/Empathy** melibatkan peneguhan orang lain, dukungan, dan orientasi komunal di mana kebaikan orang lain sama pentingnya, atau lebih dari, kebaikan diri sendiri.

- **Komitmen/Commitment** melibatkan keaslian, komitmen untuk mempertahankan percakapan yang terbuka dan berkelanjutan, dan komitmen untuk interpretasi atau mencoba untuk memahami apa yang orang lain katakan dan bagaimana perasaan mereka (Kent & Taylor, 2002). Taylor dan Kent (2014a) mengemukakan bahwa: Seseorang dapat membayangkan dialog di sepanjang sebuah kontinum, dengan propaganda atau monolog di satu ujung, dan dialog di ujung lain. Propagandis ingin membatasi kebebasan dan pilihan individu, dan menyusun pesan yang dirancang untuk menghasilkan kepatuhan dan kepatuhan. Propaganda adalah model komunikasi satu arah. . . Dialog, bagaimanapun, di ujung lain kontinum, menghargai interaksi interpersonal, dan menekankan pada pembuatan makna, pemahaman, koreasi realitas, dan interaksi simpatik / empati. Dialog merepresentasikan model dengan korespondensi yang lebih dekat. . . hidup realitas. (hal. 389).

Dialog adalah jenis percakapan dan interaksi khusus yang dipandu aturan, tetapi juga pengalaman dan terbuka. Meskipun banyak sarjana setuju bahwa dialog adalah sesuatu yang kadang-kadang dapat terjadi secara spontan dan episodik (Buber, 1923; Laing, 1961; Freire, 1970; Pearce & Pearce, 2000), dan seringkali berumur pendek, gagasan bahwa dialog adalah bagian dari proses relasional yang sedang berlangsung juga

menembus literatur (lih., Buber, 1923; Johannesen, 1990; Kent & Taylor, 2002).

Beberapa kritikus melihat dialog sebagai upaya untuk memajukan perspektif ideologis, menggambarkan dialog sebagai teori esoterik, normatif, yang terpisah dari dunia nyata (cf., Burbules, 2000; Jones, 1999), pada kenyataannya, teori dialogis sangat praktis dan berbasis pada sejumlah komunikasi interpersonal, relasional, dan prinsip filosofis yang valid, beberapa berasal dari ribuan tahun yang lalu ke Yunani kuno. Prinsip filosofis dan etika dialektika, misalnya, metode percakapan Yunani kuno untuk membedakan kebenaran, yang digunakan oleh Plato dalam dialog Socrates, menginformasikan teori dialogik. Jadi, teori dialogis bukanlah hal baru; Dialog berkisar pada asumsi retorik tentang penciptaan makna bersama (Heath, 2000, 2006) yang telah diakui selama beberapa dekade oleh pendidik, filsuf, psikolog, dan aktivis (misalnya, Bohm, 2010; Freire, 1970; Gurin et al., 2013). Baru-baru ini, dialog dimulai berpegang pada komunikator profesional dalam hubungan masyarakat, periklanan, pemasaran, jurnalisme, dan profesi lainnya (Taylor & Kent, 2014b), sebagai cara untuk menciptakan hubungan organisasi ke masyarakat yang lebih erat.

Seperti yang dikemukakan Lane (2014) secara meyakinkan, manajer seringkali lebih tertarik untuk mendapatkan keinginan mereka sendiri ketika mereka mengadakan pertemuan publik atau berkonsultasi dengan anggota komunitas dan pemangku kepentingan, daripada dengan

benar-benar membuat keputusan yang didasarkan pada tindakan terbaik. Sebagai metode komunikasi antara individu dan kelompok dengan sejarah ketegangan atau konflik di antara mereka, dialog dapat membantu peserta mengembangkan makna baru dan pemahaman bersama, dari perspektif orang lain (Bohm, 2010).

Sebuah badan penelitian yang berkembang menunjukkan bahwa dialog dikaitkan dengan berbagai macam hasil individu dan antarkelompok yang positif, seperti peningkatan keterampilan berpikir kritis, pengambilan perspektif yang lebih baik, empati, kesadaran kritis tentang masalah sosial seperti hak istimewa rasial dan diskriminasi kelembagaan (Gurin et al., 2013; Muller & Miles, 2016), dan perubahan positif dalam sikap dan perilaku antarkelompok. Mengingat bahwa bermacam-macam media sosial dan teknologi Internet yang ada sebenarnya memisahkan orang satu sama lain (Rainie & Smith, 2012; Kent, 2001), seringkali mengakibatkan ketidakpuasan relasional, kesulitan mempertahankan hubungan, narsisme, dan pikiran tertutup namun nilai komunikasi dialogis hadir sebagai alat untuk membantu orang mengambil perspektif orang lain dan belajar toleransi yang nyata. (Anderson, 1997)

2. Teori *Excellence* Public Relations

Teori *Excellence* adalah terminology yang digunakan untuk menggambarkan pengetahuan teoritis dan penemuan oleh *The International Association of Business Communicators* (IABC). Kajian ini

dilakukan oleh Hames E.Grunig. Kegiatan penelitian ini mengombinasikan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang memberikan nilai tambah secara teoritis atas kontribusi Grunnig dan beberapa sarjaan lainnya yang menyetir teori itu, yang memberikan saran dan petunjuk bagaimana organisasi dapat berpartisipasi melakukan *excellence* PR yang dibangun oleh pembina hubungan jangka panjang dengan publik-publik strategis.

Pengembangan teori *excellence* oleh Grunig, berawal dari pengamatannya terhadap petani di Columbia dan organisasi pertaniannya pada tahun 1960-an. Grunig menemukan bahwa kegagalan program komunikasi antara petani dan organisasi saat itu diakibatkan oleh jenis komunikasi satu arah yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi hanya memberikan informasi tanpa berusaha untuk mendapat *feedback* dan jenis komunikasi yang demikian tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh petani Columbia. Teori *Excellence* kemudian hadir dengan mendefinisikan satu set karakteristik fungsi public relations untuk menciptakan efektifitas organisasi. Efektifitas organisasi ini dibentuk melalui peningkatan kualitas dan penciptaan hubungan jangka panjang.

Teori *Excellence* memberi pedoman normatif untuk bagaimana hubungan masyarakat harus dilaksanakan, ditata, dan digunakan, dan itu menggambarkan faktor-faktor yang membantu hubungan masyarakat berkontribusi pada keseluruhan keunggulan organisasi. Teori Excellence menunjukkan bahwa hubungan masyarakat meningkatkan operasi

organisasi melalui pemeliharaan komunikasi dua-arah, berimbang dengan publik pada siapa organisasi pada akhirnya bergantung.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan terhadap kepala Public Relations, CEO, dan pegawai yang tergabung dalam 327 organisasi di US, Canada, dan UK, Grunig merumuskan empat karakteristik dari Public Relations yang *excellent*, yaitu: pemberdayaan fungsi Public Relations, peran sebagai komunikator, Public Relations sebagai fungsi komunikasi dan hubungannya dengan fungsi manajemen yang lain, dan model Public Relations.

Grunig (2002) melakukan penelitian terhadap fungsi Public Relation di 327 perusahaan di tiga negara. Penelitian ini dilakukan agar dapat menghasilkan proses Public Relations yang *Exellence*. Hasil penelitian ini mengemukakan sepuluh premise atau prinsip dalam implementasi *Public Relations Exellence*. Kesepuluh premis itu seperti dikutip dalam Kriyantono (2014) adalah:

- a. Organisasi mesti melibatkan aktifitas public relations dalam fungsi strategis manajemen. Setiap pengambilan keputusan mesti mempertimbangkan perspektif Public Relations agar menghasilkan kebijakan yang mencerminkan kualitas hubungan publik (*Involvement*).
- b. Public relations mesti mendapat akses langsung ke dalam kelompok dominan dan dapat langsung berkomunikasi dengan

manajer senior seperti CEO (*Empowerment*). Manajer public relations memiliki pengaruh dalam koalisi dominan.

- c. Organisasi mesti mempunyai fungsi *Public Relations* yang terintegrasi ke dalam satu departemen sendiri. Jangan sampai setiap departemen memiliki departemen *Public Relations* sendiri atau departemen Public Relations diletakkan dibawah departemen lain seperti marketing (*Integration*).
- d. Public Relations yaitu fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi manajemen yang lain seperti *Marketing, Human Resources Development*, maupun keuangan (*Independent*).
- e. Manajer Public Relations haruslah orang yang bercirikan 'Menejer Komunikasi' bukan 'Teknisi Komunikasi' (*Managerial*). Program program *Public Relations* harus dikelola secara strategis.
- f. Mengadopsi model *Two-Way Symmetric* sebagai basis utama menjalin relasi publik. Tetapi dimungkinkan untuk memadukanya dengan *Two-Way Asymmetric (Mixed Motives)*.
- g. Sistem komunikasi internal bersifat *Two-Way Symmetric*, berupa desentralisasi struktur yang menjamin otonomi antar bagian, ada dialog dua arah, dan memberi peluang anggota organisasi terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan (*Symmetrical Internal Communication*).

- h. Fungsi Public Relations model *Symmetric*, peran manajerial, pelatihan akademik Public Relations, dan profesionalitas dilaksanakan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjalankan peran manajerial dalam *System Symmetric*. Termasuk di sini pengetahuan tentang penelitian yang menunjang fungsi Public Relations (*Knowledge*).
- i. Adanya diversitas peran dalam menjalankan fungsi Public Relations. Public Relations yang *Exellence* memberikan peluang terjadinya harmonisasi multikultural dan menghindarkan dari diskriminasi gender, ras, etnis, maupun latar belakang (*Role Diversity*).
- j. Dalam menjalankan fungsinya, praktisi Public Relations harus mengutamakan kode etik dan integritas profesi (*Ethical Public Relations*), (*Responsibility, Disclosure and Social Responisbility*).

Menurut Grunig&Hunt (1984:25; dikutip dalam Kriyantono, 2014:90) lingkungan terdiri dari berbagai komponen sosial politik yang membentuk suatu kelompok publik. Publik tersebut mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya, disisi lain publik berharap organisasi dapat membantu mereka mencapai tujuannya. Aktivitas organisasi memiliki dua implikasi terhadap lingkungannya yaitu sebagai pemecah masalah dan pembuat masalah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi adalah entitas

yang bergantung kepada lingkungannya sehingga mereka harus mengandeng publik dalam merumuskan tujuan dan membuat rencana tindakan. Sehingga, kebutuhan dan analisa terhadap publik dan kebutuhannya menjadi suatu hal yang wajib.

3. Teori *Contingency of Accomodation*

Teori contingency of accommodation (CA) merupakan sebuah pengembangan teori atas kritik dari *model two-way symmetric* yang muncul dari teori *excellence in public relations* (Kriyantono, 2014, h.120). Menurut Fwakes (2004), Grunig dan Hunt (1984), Harrison (2009), dan Wehmeier (2009) (dikutip di Kriyantono, 2014, h.120), Model *two-way symmetric* merupakan sebuah dialog penuh antara sebuah organisasi dengan publiknya yang memiliki fokus pada upaya membangun hubungan serta pemahaman bersama, bukan bersifat mempersuasi public dengan berbagai cara. Dalam hal ini organisasi memandang publik sebagai bukan sebatas 'penerima' yang bersifat pasif melainkan public turut mendapatkan peran sebagai 'sumber'. Hal inilah yang membuat model *two-way symmetric* sulit menentukan siapakah penerima dan sumber dari hubungan dialogis antara organisasi dan publiknya

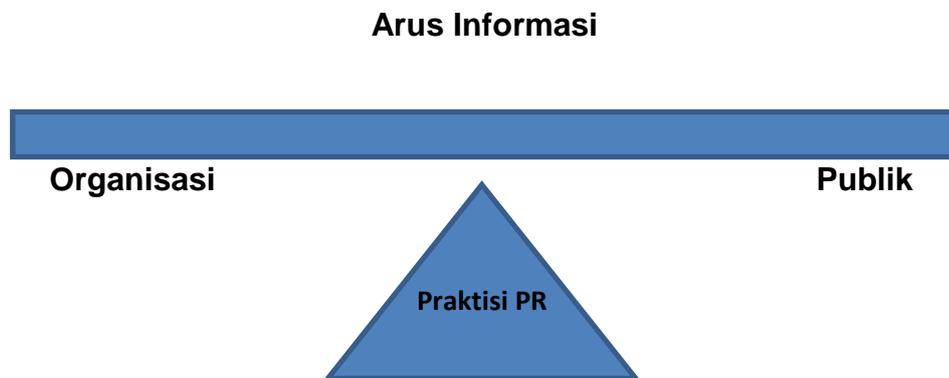
Seperti yang telah dijelaskan, teori *contingency of accommodation* memiliki sifat yang bertolak belakang *model two-way symmetric*. Kriyantono (2014) menjelaskan bahwa teori *contingency of accommodation* berpendapat bahwa praktik Public Relations harus

bergerak pada suatu kontinum (representasi dari kemungkinan sifat organisasi terhadap publiknya) antara advokasi total bagi organisasi atau klien dan akomodasi total bagi publiknya. Yang dimaksud dengan advokasi total adalah pemenuhan kebutuhan satu pihak dimana akan mengurangi pemenuhan kebutuhan pihak lainnya. Jadi, advokasi akan memenuhi kebutuhan organisasi namun akan mengurangi kebutuhan publik, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan akomodasi lebih menekankan kepada pemenuhan kebutuhan organisasi dan publiknya melalui dialog, negosiasi, dan kompromi (Kriyantono, 2014, h.120).

Akomodasi adalah situasi ketika Public Relations memenuhi kebutuhan organisasi dan publiknya melalui jalan dialog, negosiasi, dan kompromi. Sedangkan advokasi merupakan suatu situasi ketika Public Relations berusaha memenuhi kebutuhan organisasi atau publiknya dengan cara mengurangi atau meniadakan kebutuhan publiknya. Jadi, dalam advokasi pemenuhan kebutuhan organisasi akan mengurangi kebutuhan publiknya atau sebaliknya.

Teori ini secara umum menjelaskan bahwa hubungan *Win-Win Solution* yang ditawarkan oleh Model *Two-Way Symmetric* sulit untuk terwujud dikarenakan banyaknya variabel *eksternal* maupun *internal* yang dapat terjadi terhadap interaksi sebuah organisasi dan publiknya. *Teori Contingency of Accomodation* secara tegas memberikan batasan tentang posisi organisasi saat menjalin hubungan dengan publiknya. Teori ini

menganggap model symmetric sulit terwujud karena Public Relations harus dapat memilih antara bersikap akomodasi atau advokasi.



Sumber: Lane dalam Kriyantono (2014)

Cancel, et.al (Dalam Kriyantono, 2014) mengemukakan bahwa teori *Contingency of Accomodation* memposisikan cara organisasi bersikap sesuai dengan pengaruh dari faktor-faktor yang bersifat situasional. Organisasi memposisikan dirinya dalam suatu ruang antara bersikap advokasi atau akomodasi dalam suatu konflik. Dengan menyeimbangkan sikap advokasi dan akomodasi, proses komunikasi antara organisasi dan publiknya akan membangun sebuah konsensus (Kriyantono, 2014).

Cancel, et, al (Dalam Kriyantono 2014) mempresentasikan kemungkinan (*Contingency*) yang dapat mempengaruhi sifat akomodatif terhadap publik yaitu:

- Variabel Eksternal yaitu variabel yang dapat mempengaruhi sikap organisasi yang berasal dari luar organisasi seperti Pemberitaan media terhadap organisasi;

- Variabel Internal yaitu variabel yang dapat mempengaruhi sikap organisasi yang berasal dari dalam organisasi seperti karakteristik organisasi, karakteristik departemen humas, dan karakteristik individu;
- Variabel Predisposing yaitu variabel yang muncul sebelum terjadi interaksi antara organisasi dengan publiknya seperti ukuran organisasi, budaya organisasi serta afiliasi dengan kelompok dominan dan;
- Variabel Situasional yaitu variabel yang muncul secara spesifik dan berubah secara dinamis selama interaksi yang melibatkan organisasi dan publiknya seperti reputasi organisasi, keseimbangan kepentingan antara publiknya dan ancaman.

Teori ini saya anggap cocok dengan penelitian ini dikarenakan posisi Public Relations atau Humas yang bersifat dinamis untuk memenuhi kebutuhan organisasi maupun publiknya. Karena kondisi internal maupun eksternal selalu menjadi pertimbangan seorang Public Relations dalam pengambilan kebijakan. Teori ini menuntut Public Relations untuk masuk dalam top management agar dia dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan yang saya gunakan untuk memberikan pengayaan terhadap penelitian saya

sekaligus menjadi contoh dalam melakukan riset dan penulisan. Dari beberapa jurnal yang saya temui saya belum menemui judul yang persis sama dengan tema penelitian penulis namun penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan terkait teori maupun metodologi yang akan penulis gunakan.

1. *Syaiful Azhary, Rachmat Kriyantono. Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018: 213-220, Universitas Brawijaya, Kota Malang. ISSN: 0000-0000*

Penelitian ini dilakukan oleh Syaiful Azhary, Rachmat Kriyantono. Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. Penelitian dengan metode mixed methods ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman humas pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi dalam menerapkan humas online. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada para pengelola website badan publik. Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi para pengelola website terhadap fungsi dan fitur pada website resmi badan publik yang mereka kelola. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pemahaman humas pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi dalam aplikasi humas online mereka yang tertuang dalam fitur sistematis dan isi dari website instansi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi humas online masih belum memenuhi karakteristik humas online yang ideal dalam hal

operasionalisasi fitur-fitur transparency, interactivity, usability, dan website maturity. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa operasionalisasi interactivity menjadi unsur dominan dalam aktivitas di platform media sosial resmi badan publik di Indonesia. Mereka lebih memanfaatkan media sosial daripada website resmi, sehingga peneliti berargumentasi bahwa pemahaman humas terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi masih kurang.

2. Raesa Nadya, Dr. Mahyuzar. *Peran Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh Dalam Mempublikasikan Kegiatan Pimpinan Di Media Online*. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP Volume 3, Nomor 4, November 2018. Universitas Syiah Kuala, Aceh. ISSN: 0000-0000

Penelitian ini dilakukan oleh Raesa Nadya, Dr. Mahyuzar di Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai peran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online. Dalam penelitian ini digunakan 4 kategori peran Humas menurut Dozier & Broom yang dijadikan acuan oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian karena dapat menggambarkan bagaimana peran yang telah dijalankan dengan baik oleh Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan ialah teknik *Purposive Sampling* dengan 5 informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Biro Humas dan Protokol Setda

Aceh telah menjalankan peran dengan baik dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan secara rutin di media online dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan pimpinan kepada publik lalu mempublikasikan informasi tersebut melalui media online.

3. *Centurion Chandratama Priyatna, F.X Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, Anwar Sani. Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. <http://jurnal.unpad.ac.id/> Volume 8, No. 1, Juni 2020, hlm. 114-127. Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. ISSN:0000-0000*

Penelitian ini dilakukan oleh Centurion Chandratama Priyatna, F.X Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, Anwar Sani. Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan komunikasi publik pada lembaga pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi sesuai dengan standar yang tertulis pada Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan mix method dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas responden yang terdiri dari tenaga humas Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo tingkat Provinsi telah melakukan pengelolaan komunikasi publik dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dalam bentuk penyebaran narasi tunggal dan program prioritas pemerintah melalui media online dan media sosial serta melakukan media monitoring dan audit komunikasi sebagai bentuk controlling dan evaluasi.

4. Juariyah. *Peran Humas Pemerintah (Government Public Relations) Menghadapi Era Web 2.0. Proceeding International Seminar Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Relations, Jember 30 Maret 2016. Universitas Jember, Jember. ISBN: 968-602-6988-16-4.*

Penelitian ini dilakukan oleh Juariyah untuk melihat peran humas pemerintah (*Government Public Relations*) dalam menghadapi era Web 2.0. Dampak munculnya internet dalam kehidupan manusia dirasakan istimewa dan dapat dikatakan sebagai zaman keemasan komunikasi yaitu periode perubahan besar. Perubahan-perubahan radikal yang telah terjadi di web sekarang telah membawa petugas Hubungan Masyarakat untuk secara langsung kontak dengan masyarakat. Seorang Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) memiliki tugas menjelaskan dampak program dan kebijakan pemerintah terhadap warganya termasuk kalau ada isu kontroversial.

Dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki peran ganda, yaitu saat berurusan dengan media maupun publik, mereka harus mendukung posisi pemerintah menjelaskan manfaat langkah-langkah yang diambil pemerintah, dan di sisi lain mereka harus mendukung media dan kepentingan publik, misalnya membicarakan topik yang belum siap untuk dibahas oleh para pejabat.

Fungsi Humas Pemerintah dalam era Web. Sosial (Era 2.0) sekarang ini haruslah menjadi bagian dari user generated content, yaitu komunikasi yang menggunakan media sosial untuk memuat berbagai masalah dengan cara yang efektif. Pekerjaan seorang humas pemerintah

tidak ubahnya seperti seorang wartawan, yang dalam pekerjaannya selalu dekat dengan public relations digital dan mampu melakukan pekerjaannya hanya dibelakang meja. Mereka selalu mengoptimalisasikan mesin pencari seperti *Google, Microsoft Search dan Yahoo!*. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkolaborasi dan berimprovisasi secara efektif, selalu berorientasi pada perubahan, dan memiliki keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan.

5. Okafor Godson Okwuchukwu (Ph.D), Malizu Chinonye Faith. *Research Article Effective public relations and organizational management: The Bond. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research* 2(1): (2015): 24–30, Department of Mass Communication, Nnamdi Azikiwe University Awka, Nigeria. ISSN: 2393-8870

This research article was written by Okafor Godson Okwuchukwu (Ph.D) and Malizu Chinonye Faith .In recent years, the argument concerning the effects of public relations in organization management has attracted the concern of various scholars. Consequently, professionals and scholars alike have looked for the key concepts to establish the value of public relations. However, the terms “relationships” and “reputation” have emerged as the focal concepts in explaining the purpose and value of public relations. The concepts of organization-public relationships and organizational reputation can be integrated within a theoretical framework of public relations effectiveness. When those concepts are integrated in a model, the role of public relations can be captured more clearly than when there is a separate focus on each of the concepts. Therefore, this study

sort to examine the effects of public relations in achieving effective organizational management.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah di bab pertama yang menunjukkan masalah yang terjadi pada Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta kerangka konseptual dan teoritis di bab kedua yang menjadi pijakan awal penulis guna memandang masalah yang terjadi. Kajian penelitian ini lebih difokuskan pada beberapa pembenahan pada Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekertariat DPRD provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pemanfaatan media online dalam menjalin hubungan dengan publik.

Public Relation khususnya Humas Pemerintah memiliki salah satu peran sebagai fasilitator komunikasi sebagai pendengar yang peka, dan broker (perantara) komunikasi (Cutlip,dkk. 2009:47). Public Relation menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka, dengan tujuan adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Menurut Grunig (1992:285) terdapat empat model PR antara lain *press agentry, public information, two-way asymmetrical, dan two-way symmetrical.*

Media Online menjadi salah satu medium atau saluran komunikasi yang diandalkan oleh para praktisi Public Relations terutama dalam hal berkaitan hal publikasi. Kemunculan komputer dan internet ini telah membuka peluang terjadinya komunikasi oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa mengenai batas ruang dan waktu. Internet secara tidak langsung telah mengubah pandangan perusahaan dalam hal berkomunikasi dengan publik. Sejalan dengan hal ini Cutlip (2006: 228) juga menemukan perubahan pada Public Relations atas kehadiran media ini bahwa salah satu keuntungan terbesar dari internet sebagai medium public relations adalah kemampuannya untuk memberikan akses langsung dan cepat kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadi dialog didalamnya. Dalam hal ini harusnya publik berkesempatan luas untuk berdialog secara aktif dan setara dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan media online. Teori Dialogis Public Relations dikenalkan oleh Kent & Taylor. Teori ini berangkat dari satu landasan bahwa upaya menjaga dan mengembangkan hubungan komunikasi – melalui sistem dialogis daripada monologis – dengan semua elemen publik yang terpengaruh oleh aktivitas organisasi merupakan moralitas public relations. Dalam proses public relations menurut Kent & Taylor (2002; 22), “*Dialogue is explained as communicating about issues with the public.*” Penting digarisbawahi kedua penulis tidak menggunakan frasa “*to public*” tetapi “*with public*”. Artinya baik organisasi maupun publik pada dasarnya bersifat *equal* dalam proses berkomunikasi (dialog), berada

pada posisi yang sama. Kent & Taylor (2002) mendeskripsikan prinsip dasar dalam melaksanakan konsep *dialogis public relations*, yaitu mutualitas, *propinquity*, empati, risiko dan komitmen. Yang pertama adalah mutualitas. Kent & Taylor menyatakan bahwa Humas Pemerintah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri mutualitas antara lain adanya keinginan untuk berkolaborasi, empati dan semangat kesejajaran atau kesamaan. Dialog merupakan suatu proses percakapan dan saling memahami satu dengan lainnya. Saling memahami (*mutual understanding*) antara Humas Pemerintah dan Publik akan tercapai jika masing-masing memandang peserta berdialog sebagai partner. Dialog diasumsikan sebagai proses *intersubjectivity* artinya dialog mencoba memahami posisi dan pandangan masing-masing peserta dan bagaimana para peserta mencapai kesepakatan. Partisipan dalam dialog mesti dipandang sebagai *human* bukan sebagai objek. Tidak ada yang lebih superior. Kedua adalah *Propinquity*.

Teori ini menekankan tentang pentingnya Humas Pemerintah untuk memberikan informasi tentang kebijakan mereka yang relevan, berkaitan dengan mempengaruhi kepentingan publiknya. Selanjutnya memberi peluang kepada publik untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga adalah Empati. Empati ini bermakna adanya proses komunikasi yang mendukung dan saling memercayai. Empati memungkinkan Humas Pemerintah mendengar dan merasakan kebutuhan dan perasaan publiknya. Dan keempat adalah Risiko dan Komitmen. Kent

& Taylor juga memandang bahwa dialog juga mengandung resiko konflik. Hal ini dikarenakan selama dialog masing-masing peserta dapat mengekspresikan perasaan dan opini mereka. Sehingga dialog seharusnya berangkat dari komitmen peserta untuk berupaya mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mencoba mengurangi konflik. Humas Pemerintah memposisikan dirinya dalam suatu ruang antara bersikap advokasi atau akomodasi. Akomodasi adalah situasi ketika Public Relations memenuhi kebutuhan pemerintah dan publiknya melalui jalan dialog, negosiasi, dan kompromi.

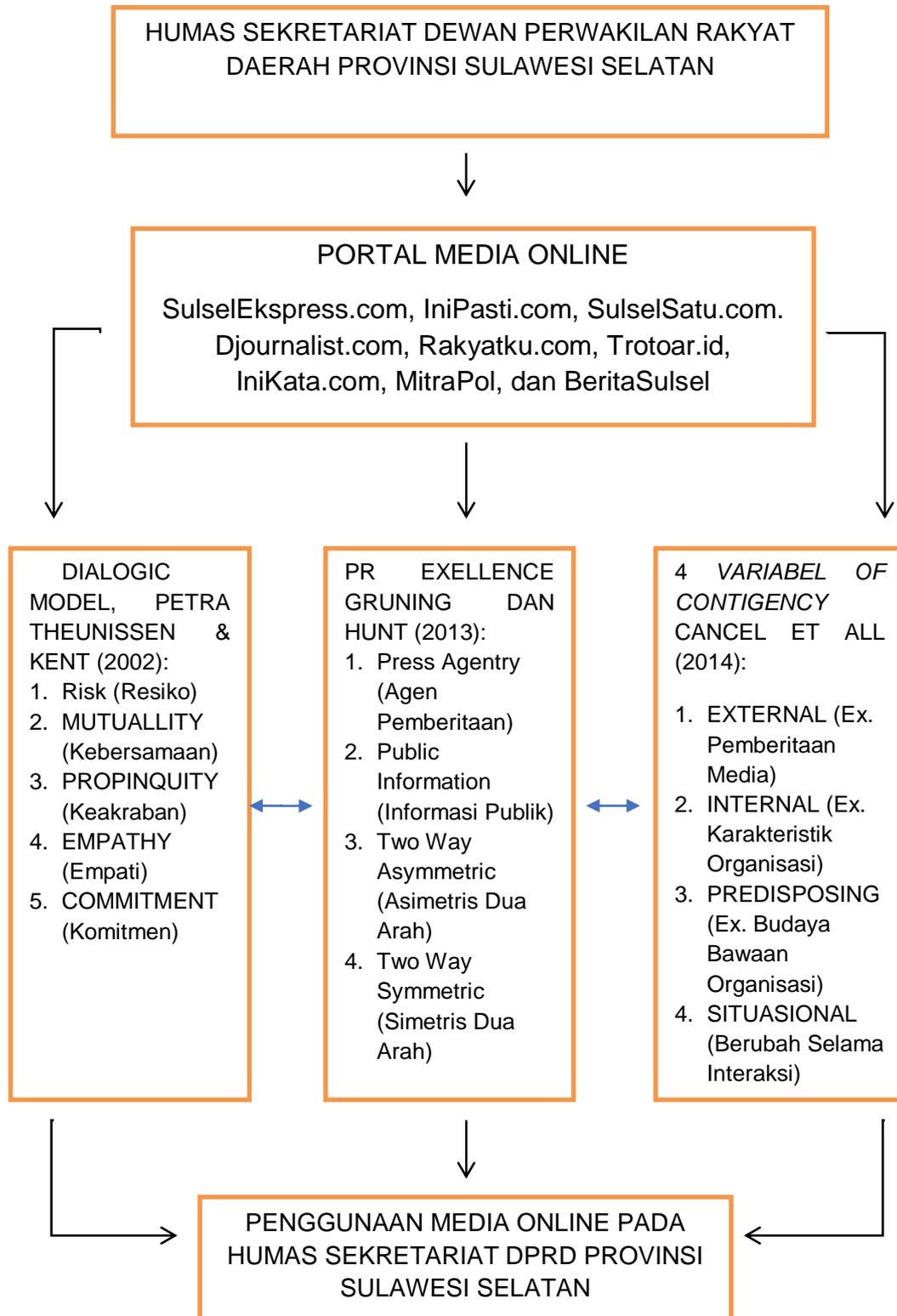
Sedangkan advokasi merupakan suatu situasi ketika Public Relations berusaha memenuhi kebutuhan Pemerintah atau publiknya dengan cara mengurangi atau meniadakan kebutuhan publiknya. Jadi, dalam advokasi pemenuhan kebutuhan organisasi akan mengurangi kebutuhan publiknya atau sebaliknya, namun dengan menyeimbangkan sikap advokasi dan akomodasi, proses komunikasi antara organisasi dan publiknya akan membangun sebuah konsensus (Kriyantono, 2014). Cancel, et, al (Dalam Kriyantono 2014) mempresentasikan kemungkinan (*Contingency*) yang dapat mempengaruhi sifat akomodatif terhadap publik yaitu:

- 1). Variabel Eksternal yaitu variabel yang dapat mempengaruhi sikap pemerintah yang berasal dari luar seperti pemberitaan media;

2). Variabel Internal yaitu variabel yang dapat mempengaruhi sikap pemerintah yang berasal dari dalam seperti karakteristik lembaga/instansi, karakteristik subbagian Humas, dan karakteristik individu;

3). Variabel Predisposing yaitu variabel yang muncul sebelum terjadi interaksi antara pemerintah dengan publiknya seperti ukuran lembaga/instansi, dan budaya serta afiliasi dengan kelompok dominan;

4). Variabel Situasional yaitu variabel yang muncul secara spesifik dan berubah secara dinamis selama interaksi yang melibatkan pemerintah dan publiknya seperti reputasi instansi/lembaga, keseimbangan kepentingan antara publiknya dan ancaman. Posisi Public Relations atau Humas pemerintah dalam hal ini bersifat dinamis untuk memenuhi kebutuhan instansi/lembaga maupun publiknya. Penulis menggambarkan hal tersebut kedalam kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1994;3) mendefinisikan sebagai prosedur penelitian iyang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan kualitatif menurut Creswell (2016) adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Menurut Creswell dalam Rochiati (2008:10-11) penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu; 1). Berlangsung dalam latar alamiah, tempat kejadian dan perilaku manusia. 2). Tidak secara apriori mengharuskan adanya teori. 3) Peneliti adalah instrument utama penelitian dalam pengumpulan data. 4). Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dalam kata-kata. 5). Fokus diarahkan pada persepsi dan pengalaman partisipan. 6). Proses sama pentingnya dengan produk, perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana

berlangsungnya kejadian. 7). Penafsiran dalam pemahaman ideografis, bukan kepada membuat generalisasi. 8). Memunculkan desain, peneliti mencoba merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber data manusia. 9). Data tidak dapat dikuantifikasi. 10). Objektivitas dan kebenaran dijunjung tinggi. derajat keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, wawasan dan manfaat.

Studi kasus menurut Yin (2008:18) adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana: multi sumber bukti dimanfaatkan. Sebagai suatu inquiry studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan. Bahkan menurut Yin seorang peneliti bisa saja melakukan studi kasus yang valid dan berkunlitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, tergantung pada topik yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Bogdan (1980:72) studi kasus adalah kajian rinci atas suatu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen. Pelaksanaan studi kasus ini bersifat fokus, di mana pengambilan data dan kegiatan penelitian menyempit ke tempat penelitian, subjek, bahan, topik dan tema. Selanjutnya Bogdan menjelaskan bahwa untuk penelitian sekolah yang cocok untuk digunakan adalah jenis studi kasus observasi. Dalam studi kasus jenis ini teknik pengumpulan data yang utama adalah melalui observasi pelibatan (participant observation), dan fokus studinya adalah suatu organisasi

tertentu (Pesantren) yang bisa terdiri dari; (1), suatu tempat tertentu di dalam organisasi (2), suatu kelompok khusus orang, dan (3), kegiatan sekolah (Bogdan. 1980:74).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat pada Jl. Urip Sumohardjo No. 59 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian direncanakan akan berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan, dimulai bulan November - Januari 2020.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian (Daymon, Holloway, 2002). Data primer diperoleh secara langsung yaitu melalui proses wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono,2011:137)). Data sekunder dapat diperoleh melalui studi literatur, jurnal-jurnal, buku teks, media online serta dari kantor maupun sumber lainnya seperti program kerja tahunan Subbagian Humas, Protokol, dan Publikasi.

D. Teknik Pengambilan Data dan Jumlah Informan

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti (Slamet 2011). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pemahaman para objek penelitian mengenai penggunaan media online di era digital informasi.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Pada informan yang masuk dalam fokus penelitian peneliti dapat bertanya beberapa kali (Intensive Interview) sedangkan informan yang tidak bersentuhan langsung dapat di interview satu kali saja. Biasanya teknik wawancara mendalam dipadukan dengan teknik observasi partisipatif (Kriyantono, 2014). Penulis memilih menggunakan wawancara mendalam karena Penulis ingin menggali dulu tentang pemahaman para pemangku kepentingan terkait posisi humas berdasarkan peran dan fungsi sesuai kajian konsep dan teori yang Penulis kemukakan didukung oleh Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Bersama, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan gubernur.

b. Wawancara Semistruktur

Wawancara ini peneliti dapat memiliki panduan wawancara tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas. Wawancara ini dilakukan dengan metode FGD (Focus Group Discussion).

Guna mengarahkan penulis dalam pengumpulan data, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah panduan wawancara. Guna memahami lebih dalam tentang peran dan fungsi humas maka penulis merasa perlu memberikan ruang agar penulis dapat memberikan

pertanyaan lanjutan jika dibutuhkan. Sehingga penulis dapat memahami dengan baik peran fungsi humas, implementasi serta tantangan yang dihadapi oleh humas sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan objek-objek melalui penggunaan panca indra. Observasi dalam penelitian dapat dilakukan jika memenuhi syarat antara lain observasi bersifat sistematis, tujuan telah ditetapkan, dapat di cek validitas dan reliabilitasnya. Penulis mengambil dua instrumen observasi yaitu Analisa Dokumen dan Diary Keeping. Dokumen yang dianalisa dapat berupa dokumen publik maupun privat sedangkan Diary Keeping artinya peneliti menyimpan catatan harian yang berisi perasaan, sentimen, pemikiran berkala dan pikiran lainnya mengenai proses riset itu sendiri. Peneliti harus memahami setting atau situasi tempat observasi, subjek atau siapa yang di observasi , perilaku subjek observasi, frekuensi observasi serta dokumentasi observasi (Kriyantono, 2014).

E. Teknik Pengambilan Data dan Jumlah Informan

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2010:122) adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sementara

menurut Jogiyanto (2007:79) menyatakan bahwa purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Sedangkan quota sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya.

Informan dalam penelitian adalah pihak yang representatif dalam memberikan informasi terkait penelitian penulis. Penulis melihat ada beberapa orang yang dapat dianggap representatif dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub bagian Humas dan Protokol sebagai Pelaksana teknis kehumasan dilingkungan Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kriteria informan kedua adalah Staf Subbagian Humas dan Protokol yang berjumlah + 14 (Empat Belas) Orang akan dipilih menjadi 4 Orang 2 wanita dan 2 Pria. Mereka adalah pelaksana yang menjalankan tupoksi melalui program kerja tahunan Sub Bagian Humas Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

No.	Nama Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/ Jabatan
1.	Mahyuddin, S.Sos., M.Si		Strata 2	Kepala Sub. Bagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi

2.	Asrul Nurdin, S.Sos		Strata 1	Staf
3.	Asmira AM, SE		Strata 1	Staf
4.	Muchsin, S.Sos		Strata 1	Staf
5.	Hj. Dirna Ningsih, S.Sos		Strata 1	Staf
6	Darwis Boha, S.Sos		Strata 1	Staf

Sumber: Olah data oleh Penulis, 2020

Proses pemilihan informan dimulai ketika penulis melakukan kunjungan awal ke lokasi penelitian dan melakukan observasi awal tentang penggunaan media online di Subbagian Humas, Protokol, dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

F. Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Penjelasan Creswell (2009) bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi.

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan,

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aceng, *Press Relation: Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Agus Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
- Anderson, Rob, and Kenneth N. Cissna. *The Martin Buber-Carl Rogers Dialogue: A New Transcript With Commentary*. Albany: SUNY Press, 1997.
- Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Aras, M. (2014). Kegiatan *government* Public Relation dalam membangun komunikasi dengan dunia pers: studi kasus humas pemerintah kota administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Humaniora*, 5(2), 1056– 1065. <https://doi.org/1056-1065>.
- Ardianto, Soleh Soemirat. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Azhary, Syaiful. Kriyantono, Rachmat. 2018. Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. Diunduh pada 12 September 2020. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/267628-understanding-of-public-relation-officer-76c1c951.pdf>.
- Bagdakian, Ben H. 2004. *The New Media Monopoly*. Boston: Beacon Press.
- Buber, Martin. *I and Thou*. Edinburg: T&T. Clark, 1970.

- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creeber, G. & Martin, R (ed.). (2009), *Digital Cultures: Understanding New Media, Berkshire-England*: Open University Press.
- Creswell, John W. (2009) *Research Design (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crespo, M. J., & Echart, N. (2011). *The Role and Functions of Government Public Relations. Lessons from Pubic Perceptions of Government. Central European Journal of Communication*, 1, 109-123.
- Cutlip, S. M., Center, A. H Dan Broom, G. M. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.
- Daymon, Cristine & Immy Holloway. (2002) *Metode – Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Penerbit Cahya Wiratma, Yogyakarta: Bentang.
- Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. (2002). *Excellence in public relations and communication management: A review of the theory and results*. Dalam Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. (Eds.). *Excellent public relations and effective organization*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Grunig, James E., Hunt, Todd. 1984. *Managing Public Relations*. Belmont, CA: Thompson Wadworth.
- Harlow, Rex F. (1976). *Building a Public Relations Definition. Public Relations Review* 2 No.4.
- Heeter, Carrie, 1988. *Communications and Information Science Series*. New York: Ablex Publishing.

- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Penerapan *e-Government*.
- Iswara, H. (2001). *Hidup Sederhana Berfikir Mulia P.K. Ojong: Satu dari Dua Pendiri Kompas-Gramedia*. Jakarta: Kompas.
- Jack Febrian, Farida Andayani, 2002 *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Bandung, Informatika.
- Jogiyanto. (2007) *Sistem informasi keperilakuan*, Yogyakarta: Andi.
- John M. Echols dan Hasan Shadili, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Juariyah. 2016. *Tantangan Humas Pemerintah (Government Public Relations) menghadapi Web 2.0*. Dalam: Cahyono HB et al. *e-Proceeding International Seminar on Good Governance in The Policy Implementation Process and Public Communication*. 2016 Mar 30; Jember, Jawa Tengah. Indonesia. p. 60.
- Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations*. Edisi keempat. Jakarta. Erlangga.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kent, Michael L and Taylor, Maureen, 2002, "*Toward a Dialogic Theory of Public Relations*", *Public Relations Review*, volume 28, Februari 2002.
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Kriyantono, R. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kurnia, Septiawan Santana. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Lane. E.J, 1993, *The Public Sector: Concepts, Models, and Approaches*, London: Sage Publications.
- Lattimore, dkk. 2010. Public Relations: Profesi dan Praktik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lievrouw, L. (2011). *Alternative and Activist New Media*. Cambridge: Polity Press.
- Lim, Francis. Filsafat Teknologi : Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat. Yogyakarta : Penerbit Kanisius. 2008.
- McQuail, D. (2003). Teori komunikasi massa. Jakarta: Penerbit Erlangga
- McQuail, Denis. 2009. *Mass Communication Theory*. London: Stage Publication.
- Miles, M.B. & Huberman, M. (1992) Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2004) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Morissan dan A. C. Wardhany. 2009. Teori Komunikasi. Cetakan Pertama. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nadya,Raesya. Mahyuzar, Dr. 2018. Peran Biro Humas Dan Protokol Setda Aceh Dalam Mempublikasikan Kegiatan Pimpinan Di Media Online.Diunduh pada 12 September 2020. Available from: <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/11100>.
- Nasution. (2003) Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Penerbit Tarsito, Bandung.

Okwuchukwu, Godson, Okafor . Faith, Chinonye. Malizu. 2015. *Research Article Effective public relations and organizational management: The Bond. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research* 2(1). Diunduh pada 12 Oktober 2020. Available from: <http://saspijournals.com/wp-content/uploads/2014/12/SJAHSS-26B982-987.pdf>.

Patton, Michael Quinn. (1987) Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*(hlm. 330-331). Cetakan ke-29, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 6 Tahun 2014 tentang Pranata Humas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Humas Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Pemerintah.

Piliang, Yasraf Amir. 2012. Masyarakat Informasi dan Digital:Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sositologi* Edisi 27.

Priyatna, Chandratama, Centurion. Prastowo, Agung, Ari. Syuderajat, Fajar. Sani, Anwar.2020. Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. Diunduh pada 24 Oktober 2020. Available from: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/26115/13418>.

- Ruben, Brent D., Stewart, Lea P. 2013. *Komunikasi Dan Perilaku Manusia (EdisiKelima)*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Ruslan, R. 2012. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Cetakan kesebelas. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Sari. B.W.N. 2012. *Humas Pemerintah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Seitel,Fraser. 1992. *International Editions, The Practice of Public Relations*. New jersdy Prentinee Hall.
- Setyani. (2013). *Penggunaan Media sosial sebagai sarana Komunikasi bagi Komunitas*.
- Silalahi, Ulber. (2009) *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Smith, D. Ronald.2005. *Strategic Planning For Public Relations. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates Publisher*. London.
- Sugiyono. (2010) *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2014). *Metode Peneiltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarjo. 1985. Public Relation. Bandung: Bina Cipta.

Tench, Ralph and Yeoman, Liz. (2006). Exploring Public Relations (1st edition). Harlow: Prentice Hall.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi.

Wilcox dan Cameron, Public Relations: Strategies And Tactics,2006.

Situs Berita Online dan Internet

<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp> (Diakses pada 02 Oktober 2020)

<https://ebooks.gramedia.com/id/koran/tribun-timur/24-jul-2020> (Diakses pada 12 Oktober 2020).

<https://ebooks.gramedia.com/id/koran/tribun-timur/09-sep-2020> (Diakses pada 12 Oktober 2020).

Sulselekspress.com

<https://sulselekspres.com/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/>

<https://sulselekspres.com/sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-test-gratis-sediakan-500-kuota/>

<https://sulselekspres.com/ketua-dprd-sulsel-sambut-baik-soal-pemprov-pertahankan-raihan-wtp/>

<https://sulselekspres.com/dprd-sulsel-dukung-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://sulselekspres.com/komisi-a-dprd-sulsel-bahas-program-prioritas/>

<https://sulselekspres.com/pemprov-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-tahun-anggaran-2021/>

<https://sulselekspres.com/putra-wakil-ketua-dprd-sulsel-berhasil-khatam-30-juz-al-quran-di-gowa/>

<https://sulselekspres.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-beri-bantuan-korban-kebakaran-pannampu-makassar/>

<https://sulselekspres.com/wakil-ketua-dprd-sulsel-serahkan-ratusan-ternak-sapi-di-sidrap/>

<https://sulselekspres.com/legislator-dprd-sulsel-meninggal-dunia-ini-biografi-ince-langke/>

IniPasti.com

<https://inipasti.com/pansus-dprd-sulsel-kunker-ke-pemkab-maros/>

<https://inipasti.com/kpp-dprd-sulsel-kunjungi-rutan-perempuan-kelas-i-makassar/>

<https://inipasti.com/pimpinan-dprd-sulsel-bahas-penanganan-covid-dengan-calon-jenderal/>

<https://inipasti.com/anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal-dunia-saat-rapat-banggar/>

<https://inipasti.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-pasang-badan-untuk-taufan-pawe/>

<https://inipasti.com/pemprov-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-2021/>

<https://inipasti.com/fraksi-golkar-dprd-sulsel-beri-bantuan-korban-kebakaran-pannampu-makassar/>

<https://inipasti.com/putra-wakil-ketua-dprd-sulsel-berhasil-khatam-30-juz-al-quran-di-gowa/>

<https://inipasti.com/wakil-ketua-dprd-sulsel-tiga-makna-merdeka-di-tengah-pandemi/>

<https://inipasti.com/berkat-budidaya-porang-wakil-ketua-dprd-sulsel-terima-penghargaan-dari-mentan/>

<https://inipasti.com/ketua-dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-buat-program-kepemudaan/>

<https://inipasti.com/ranperda-disetujui-dprd-sulsel-harap-bawa-perubahan/>

<https://inipasti.com/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/>

<https://inipasti.com/pemprov-terima-wtp-ketua-dprd-sulsel-kita-akan-tindaklanjuti/>

<https://inipasti.com/dprd-sulsel-dukung-prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://inipasti.com/ketua-dprd-sulsel-kekuatan-leadership-pak-rudy-tentukan-penanganan-covid-19/>

<https://inipasti.com/tolak-ruu-hip-sejumlah-ormas-temui-anggota-dprd-sulsel/>

Sulselsatu.com

<https://www.sulselsatu.com/2020/10/01/politik/apt-politisi-muda-nasdem-diberi-amanah-jabat-wakil-ketua-komisi-c-dprd-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/25/opd/dprd/kaukus-perempuan-parlemen-dprd-sulsel-berbagi-dengan-warga-binaan-rutan-makassar.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/23/opd/dprd/nasdem-siapkan-mizar-roem-gantikan-pipink-di-dprd-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/15/opd/dprd/wakil-ketua-dprd-sulsel-bahas-penanganan-covid-19-bersama-calon-jendral-polri.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/08/video/video-nimatullah-ungkap-kronologi-kematian-anggota-dprd-sulsel-ince-langke.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/09/07/opd/dprd/komisi-a-dprd-sulsel-raker-bahas-ketersediaan-blanko-ktp.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/video/video-aksi-unjuk-rasa-di-dprd-sulsel-tuntut-wahli-tinggalkan-pulau-sangkarrang.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/berita-utama/taufan-pawe-digoyang-fraksi-golkar-dprd-sulsel-pasang-badan.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/28/opd/dprd/pemprov-dan-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-ppas-apbd-ta-2021.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/23/opd/dprd/dprd-makassar-dukung-rencana-pemprov-sulsel-rekrut-guru-berasal-dari-pulau.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/23/opd/dprd/dprd-makassar-dukung-rencana-pemprov-sulsel-rekrut-guru-berasal-dari-pulau.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/14/opd/dprd/dprd-apresiasi-langkah-gubernur-atasi-bencana-di-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/08/06/opd/dprd/komisi-e-dprd-sulsel-rapat-bersama-mitra-terkait-pelaksanaan-apbd-2019.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/07/28/opd/dprd/dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-basmin-kolaborasi-buat-program-kepemudaan.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/07/23/berita-utama/pukat-upa-temukan-indikasi-korupsi-anggaran-penyebaran-perda-di-dprd-sulsel.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/07/22/hukum/pukat-temukan-indikasi-korupsi-penyebaran-perda-dprd-sulsel-sebesar-20-m.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/07/20/makassar/dprd-setujui-ranperda-kerja-sama-sister-province-sulsel-dengan-jepang.html>

<https://www.sulselsatu.com/2020/07/06/berita-utama/dprd-sulsel-dukung-cara-pemkot-makassar-cegah-penyebaran-covid-19.html>

Djournalist.com

<http://metro.djournalist.com/read/2020/09/30/16538/dprd-sulsel-sahkan-apbd-perubahan-2020>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/09/08/16337/anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal-saat-rapat-banggar>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/08/27/16241/gubernur-dan-dprd-sulsel-teken-kua-ppas-2021>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/08/11/16136/ketua-dprd-sulsel-apresiasi-pemprov-asei-bina-holding-mou-investasi>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/07/27/16063/ketua-dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-buat-program-kepemudaan>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/07/06/15693/dprd-sulsel-dukung-prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar>

<http://metro.djournalist.com/read/2020/07/01/15654/hut-bhayangkara-ketua-dprd-sulsel-harap-situasi-kamtibmas-kondusif>

Rakyatku.com

<https://rakyatku.com/read/188987/innalillah-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-meninggal-dunia>

<https://rakyatku.com/read/188988/tiba-tiba-jatuh-saat-bicara-dalam-rapat-detik-detik-anggota-dprd-sulsel-ince-langke-tutup-usia>

<https://rakyatku.com/read/188529/oknum-anggota-dprd-sulsel-dilapor-ke-kejati-dugaan-penyelewengan-dana-bpnt>

<https://rakyatku.com/read/188076/silaturahmi-bersama-fraksi-golkar-dprd-sulsel-taufan-cerita-keterpilihan-dan-program>

<https://rakyatku.com/read/187721/rs-mengeluh-bpjs-telat-bayar-utang-dprd-sulsel-semoga-lebih-baik-lagi-dalam-jalankan-tugas>

<https://rakyatku.com/read/187210/terjadi-dualisme-kepemimpinan-di-puskud-dprd-sulsel-harap-bisa-dorong-perekonomian>

<https://rakyatku.com/read/186887/prof-rudy-dapat-dukungan-dari-dprd-sulsel-tuntaskan-covid-19-di-makassar>

<https://rakyatku.com/read/186686/hadiri-peringatan-hut-bhayangkara-ketua-dprd-sulsel-titip-harapan-ini>

Trotoar.id

<https://trotoar.id/2020/09/30/dprd-sulsel-sahkan-apbd-p-10-8-t/>

<https://trotoar.id/2020/09/30/sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-tes-massal/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/ini-kronogis-polisi-hambur-pengunjuk-rasa-di-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/aliansi-mahasiswa-pertanian-demo-kantor-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/24/demo-hari-tani-depan-dprd-sulsel-di-warnai-penangkapan-belasan-aktifis/>

<https://trotoar.id/2020/09/19/sekwan-dprd-sulsel-proses-usulan-pengunduran-diri-tiga-anggota-dewan/>

<https://trotoar.id/2020/09/16/ketua-dprd-sulsel-dukung-pasar-wisata-modern/>

<https://trotoar.id/2020/09/09/dprd-sulsel-tetapkan-7-komisioner-kpid-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/09/08/wafat-saat-rapat-banggar-di-dprd-sulsel-ijenazah-ince-langke-disemayamkan-di-dprd/>

<https://trotoar.id/2020/09/08/breaking-news-anggota-dprd-sulsel-ince-lengke-pingsan-saat-bicara-di-rapat-banggar/>

<https://trotoar.id/2020/08/24/banggar-dprd-sulsel-minta-pemprov-narasikan-kua-ppas/>

<https://trotoar.id/2020/08/17/mentan-syl-serahkan-penghargaan-ke-wakil-ketua-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/08/14/tuntut-ruu-cilaka-dihentikan-buruh-unjuk-rasa-di-depan-gedung-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/08/13/ketua-dprd-sulsel-temui-pengunjuk-rasa/>

<https://trotoar.id/2020/08/13/mahasiswa-bulukumba-geruduk-kantor-dprd-sulsel-rapim-di-bubarkan/>

<https://trotoar.id/2020/07/27/ketua-dprd-sulsel-siap-sinergi-dengan-knpi-arham-basmin/>

<https://trotoar.id/2020/07/27/ketua-dprd-sulsel-ajak-knpi-arham-bersinergi-bangun-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/07/15/ini-hasil-rdp-dprd-sulsel-soal-tambang-pasir-laut/>

<https://trotoar.id/2020/07/10/delapan-staf-dprd-sulsel-dinyatakan-reaktif/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/pimpinan-dprd-sulsel-sebut-belum-ada-lhp-dari-bpk/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/sekretariat-dprd-sulsel-kecurian-tiga-laptop-digondol-maling/>

<https://trotoar.id/2020/07/06/dprd-sulsel-dukung-prof-rudy-cegah-penyebaran-covid-19-di-makassar/>

<https://trotoar.id/2020/07/03/tolak-ruu-hip-gabungan-ormas-cari-wakil-parpol-pengusul-di-dprd-sulsel/>

<https://trotoar.id/2020/07/02/ketua-dprd-sulsel-sosialisasi-perda-nomor-9-tahun-2016-dapat-antusias-warga-maros/>

<https://trotoar.id/2020/07/01/ikuti-upacara-hut-bhayangkara-ini-pesan-ketua-dprd-sulsel/>

IniKata.com

<https://inikata.com/2020/09/30/aliansi-pemuda-bone-menggugat-bawa-persoalan-program-paket-sembako-ke-dprd-sulsel/> 30 September 2020, 15:51

<https://inikata.com/2020/09/25/ketua-dprd-sulsel-sambangi-blok-hunian-perempuan-rutan-makassar/> 25 September 2020, 22:20

<https://inikata.com/2020/08/18/wakil-ketua-dprd-sulsel-syahr-terima-penghargaan-petani-porang-inspiratif-2020/> 18 Agustus 2020, 08:45

<https://inikata.com/2020/08/13/mahasiswa-bulukumba-berunjuk-rasa-di-dprd-sulsel-ini-tuntutannya/> 13 Agustus 2020, 21:31

<https://inikata.com/2020/08/07/komisi-e-dprd-sulsel-bahas-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2019/> 7 Agustus 2020, 07:48

<https://inikata.com/2020/07/28/knpi-arham-basmin-temui-ketua-dprd-sulsel-bahas-ini/> 28 Juli 2020, 08:25

<https://inikata.com/2020/07/21/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/> 21 Juli 2020, 08:23

<https://inikata.com/2020/07/10/dinkes-dan-sekretariat-dprd-sulsel-gelar-rapid-test-massal/> 10 Juli 2020, 11:42

<https://inikata.com/2020/07/08/pemprov-kembali-raih-wtp-ketua-dprd-sulsel-alhamdulillah/> 8 Juli 2020, 09:46

<https://inikata.com/2020/07/06/dprd-sulsel-temui-pj-walikota-makassar-bicara-soal-penanganan-covid-19/> 6 Juli 2020, 20:31

<https://inikata.com/2020/07/04/aliani-penjaga-gerbang-timur-indonesia-sambangi-dprd-sulsel-ini-tuntutannya/> 4 Juli 2020, 13:30

<https://inikata.com/2020/07/02/wakil-ketua-dprd-sulsel-ajak-masyarakat-dukung-polri-ciptakan-kamtibmas/> 2 Juli 2020, 07:22

Berita Sulsel

<https://mitrapol.com/2020/09/30/dprd-sulsel-gelar-raker-pansus-bahas-pemberian-insentif-dan-kemudahan-investasi/> 30 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/25/peringati-satu-tahun-masa-bakti-keanggotaan-dprd-provinsi-sulsel-anggota-kpp-kunjungi-rutan/>

25 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/15/jalin-sinergitas-dengan-legislatif-kapolda-irjen-merdisyam-kunjungi-dprd-provinsi-sulsel/> 15 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/14/sidang-paripurna-penandatanganan-nota-kesepakatan-bersama-dprd-dengan-gubernur-sulsel/> 14 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/09/09/meninggal-saat-hadiri-sidang-gubernur-kita-kehilangan-putra-terbaik-sulawesi-selatan/> 9 September 2020

<https://mitrapol.com/2020/08/28/nota-kesepakatan-kua-dan-ppas-apbd-tahun-anggaran-2021-ditandatangani-pemprov-dan-dprd-sulsel/> 28 Agustus 2020

<https://mitrapol.com/2020/07/20/dprd-setujui-ranperda-kerjasama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/> 20 Juli 2020

<https://mitrapol.com/2020/07/16/bahas-pulau-sangkarrang-komisi-d-dprd-sulsel-gelar-rpd/> 16 Juli 2020

IndonesiaInside.id

<https://beritasulsel.com/baca/innalillah-anggota-dprd-provinsi-sulsel-asal-selayar-tutup-usia> 8 September 2020

<https://beritasulsel.com/baca/wagub-sulsel-turut-berduka-atas-meninggalnya-legislator-dprd-sulsel-ince-langke> 9 September 2020

<https://beritasulsel.com/baca/wagub-sulsel-hadiri-rapat-paripurna-dprd-sulsel-secara-virtual> 14 September 2020

Portal Makassar

<https://indonesiainside.id/news/nusantara/2020/08/28/diduga-selewengkan-dana-bpnt-anggota-dprd-sulawesi-selatan-dilaporkan>
28/08/2020 - 12:33 WIB

BeritaNews.com

<https://pedoman.media/read/189/legislator-makassar-nurul-hidayat-turut-berduka-cita-meninggalnya-ince-langke> 08 September 2020 14:17

AntaraNews.com

<https://makassar.antarane.ws.com/berita/204762/pemprov-sulsel-target-61-persen-pertumbuhan-ekonomi-pada-2021>